

**KOMUNIKASI PEMBANGUNAN GEDUNG BIOSKOP DI
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Belli Bel Fatjeri

NIM. 180401081

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

BANDA ACEH

1443/2022

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh

Belli Bel Fatjeri
NIM. 180401081

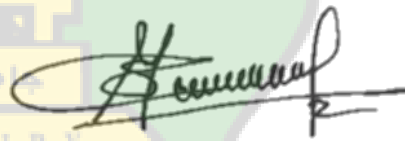
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



(Dr. Salman Yoga, M. A)
NIP. 197107052008011010

Pembimbing II



(Asmaunizar M. Ag)
NIP. 197409092007102001



SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Komunikasi dan Penyiaran Islam
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Diajukan Oleh


BELLI BEL FATJERI
NIM. 180401081

Pada Hari/Tanggal

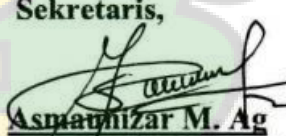
Selasa, 19 Juli 2022 M
19 Zulhijjah 1443 H

Di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,


Dr. Salman Yoga, M. A
NIP. 197107052008011010

Sekretaris,


Asmaulhizar M. Ag
NIP. 197409092007102001

Anggota I,


Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A
NIP. 197309212000032004

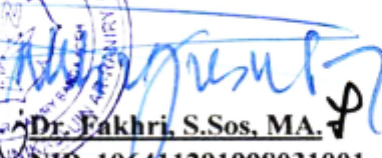
Anggota II


Azman, S.Sos.I., M.I.Kom
NIP. 198307132015031004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry




Dr. Fakhri, S.Sos. MA.
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Belli Bel Fatjeri
NIM : 180401081
Jenjang : Srata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul **“Komunikasi Pembangunan Gedung Bioskop di Kota Banda Aceh”** ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia Akademis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini, atau adanya kritikan terhadap keasliannya.

Banda Aceh, 19 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Belli Bel Fatjeri
NIM. 180401081



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, Tuhan yang Maha Pengasih yang tidak pilih kasih. Shalawat beriring salam semoga tercurah atas Nabi besar Muhammad Saw, keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang selalu beriltizam dengan ajarannya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang Maha segalanya dan berkat rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Komunikasi Pembangunan Gedung Bioskop Di Kota Banda Aceh”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan Pendidikan S1 pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (UIN Ar-Raniry).

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terselesaikan tanpa bantuan pihak lain. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran waktu dan tenaga serta bantuan moral maupun material khususnya kepada :

1. Keluarga tercinta, Ayahanda tercinta Amat Cita dan Ibu Bariana serta seluruh keluarga besarku, Bang Agusri Fajar dan Adek Oktian Maulana, terimakasih atas doa, dukungan, dan motivasi yang tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos., MA. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry beserta Wakil Dekan yang telah ikut membantu penulis melaksanakan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Azman, M.I,Kom. Selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam beserta seluruh staf Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.

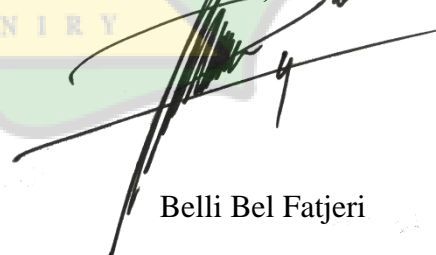
4. Ibu Asmaunizar, S.Ag.,M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama kuliah di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Dr. Salman Yoga, MA. selaku pembimbing I dalam menyelesaikan skripsi ini telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Asmaunizar, S.Ag.,M.Ag. sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Kepada Wali Kota Banda Aceh, Kepala Dinas BPNB Aceh, Kepala Dinas Perizinan Satu Pintu Kota Banda Aceh, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yang telah banyak memberikan informasi terkait tentang judul yang penulis ajukan.
8. Bapak Nabhany As, Bapak Fauzan Santa, Bapak Azhari Aiyub, Bapak Davi Abdullah sebagai narasumber didalam penulisan skripsi ini dan telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat setia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak ada kata lebih istimewa dari pada kata terimakasih yang saya ucapkan, dalam perjuangan, perintisan, seperantaun, yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada semua mahasiswa -mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam leting 18 yang telah rela berjuang sama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada rekan kerja saya yang tergabung dalam PT. Aceh Asia dan Yayasan Aceh Bergerak yang telah memeberikan wadah belajar untuk penulis.
12. Terkhusus untuk semua keluarga Himpunan Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam periode 2021-2022 yang telah banyak memberi manfaat kepada penulis sehingga memberikan semangat dalam menyelesaikan perkuliahna ini.
13. Terimakasih kepada HMP KPI, DEMA FDK, SEMA FDK, Komunitas Film Trieng, Univeritas Project, AMDIN,FORKOMNAS, Ar-Ranriry Tv, Radio Assalam.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari dalam penlisan skripsi ini tidak luput dari kekhilafan yang dapat menimbulkan kesalahan, Dengan ini penulis menerima berbagai kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki ketidak sempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia Pendidikan dalam bidang Ilmu Komunikasi di Indonesia.

Banda Aceh, 19 Juli 2022

Penulis,



Belli Bel Fatjeri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Penjelasan Konsep/Istilah Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	15
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan.....	15
B. Komunikasi.....	20
D. Pembangunan.....	26
E. Gedung Bioskop	31
F. Teori Yang Digunakan	35
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pengertian Metode Penelitian	52
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	53
C. Lokasi Penelitian	54
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Teknik Analisa Data.....	55
F. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	57
A. Gambaran Umum Dinas Pemerintahan Kota Banda Aceh.....	57
B. Faktor Penyebab Gedung Bioskop Di Aceh Tidak Terealisasi Sampai Saat ini	68
C. Komunikasi Pemerintah Terkait Pembangunan Bioskop Di Kota Banda Aceh.....	78
D. Pembahasan dan Hasil Penelitian	89

BAB V PENUTUPAN.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSAKA.....	98
LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

1. Tabel 0.1 Daftar Bioskop Yang Ada Di Aceh Sebelum Tutup
2. Tabel 0.2 Perkembangan Bioskop di Kota Banda Aceh



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa
2. Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4. Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Nama : Belli Bel Fatjeri
Judul : Komunikasi Pembangunan Gedung Bioskop di Kota Banda Aceh
NIM : 180401081
Jur/Fak : Komunikasi Penyiaran Islam / Dakwah dan Komunikasi

Masa kejayaan bioskop di Aceh berawal pada tahun 1900 hingga tahun 2004. Berawal dari ketiadaan bioskop di Aceh yang sudah lama tidak hadir sejak masa konflik, pasca tsunami, dan pemberlakuan Syariat Islam, membuat anak muda Aceh bergerak untuk melakukan gerakan sosial termanifestasi. Penelitian ini menjelaskan tentang tidak adanya gedung bioskop di Kota Banda Aceh, sebagai Kota yang menerapkan peraturan Syariat Islam tentu bioskop menjadi salah satu framing buruk bagi masyarakat terkait fasilitas gedung yang gelap dan bercampurannya laki-laki dan perempuan. Hal ini menyebabkan gedung bioskop tidak terealisasi karena kurangnya kejelasan dan regulasi yang diberikan oleh pemerintah terkait tentang bagaimana selayak dan sepatutnya pembangunan gedung bioskop di Kota Banda Aceh. Rumusan masalah dalam penelitian ini terkait mengapa sampai saat ini bioskop tidak terealisasi di Kota Banda Aceh dan bagaimana komunikasi pemerintah terkait perizinan pembangunan bioskop di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sementara itu, untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada kejelasan regulasi terkait perizinan pembangunan gedung bioskop sebagai sarana hiburan dan maraknya terjadi pembobolan link film ilegal yang dilakukan oleh anak muda untuk mengakses film komersil yang masih tayang di bioskop. Oleh karena itu, komunikasi perizinan terkait dengan pembangunan sangat penting adanya agar tidak terjadi hal yang bisa membuat pengusaha film enggan membangun bioskop di Kota Banda Aceh. Hal ini juga perlu adanya ketegasan dari pihak terkait agar tidak ada framing yang lebih buruk terhadap Kota Banda Aceh.

Kata kunci: Komunikasi, Pembangunan, Gedung Bioskop

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perfilman di Indonesia tidak dapat lepas dari perubahan sosial di Indonesia. Sejak awal diperkenalkannya film tahun 1900 hingga perkembangan sampai akhir tahun 1990-an, bioskop memegang peranan penting sebagai media bagi film untuk menyampaikan pesan dan informasi dalam film tersebut. Ketika bioskop pertama Indonesia didirikan di Batavia. Secara populer “bioskop” dikenal sebagai gedung atau tempat pertunjukan film untuk umum dengan dipungut bayaran. Bioskop, berasal dari Bahasa Yunani, gabungan sukukata *bios* yang artinya hidup dan *skopion* atau *skopein* yang artinya melihat atau mengamati. Sejak awal kehadirannya di Indonesia diterjemahkan gambar hidoep. Secara khusus “bioskop” dapat diartikan sebagai tempat bercengkrama (*rendevous*) bagi pembuat (Sineas) dengan penggemar seni film.¹

Melalui surat kabar Batavia tanggal 4 Desember 1900. Termuat disana kabar menggemparkan Nederlandsche Bioscope Maatschappij (perusahaan bioskop Belanda), mulai tanggal 5 Desember 1900 menyelenggarakan pertunjukan besar pertama yang akan berlangsung tiga malam, mulai pukul 19.00, di sebuah rumah di Tanah Abang Kebondjoe (Manage), sebelah pabrik kereta (bengkel mobil) Maatschappij Fuchss.²

¹ Takashi dan Shiraishi. *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat Di Jawa*, (Jakarta: Midas Surya. 1997). H. 1912- 1926.

² Tjasmadi, HM Johan, dan SM Ardan. *Sejarah Bioskop*. (Jakarta: Sinematek Indonesia, 1992). H. 45-47.

Di Aceh sendiri pada tahun 1900- 1936 tercatat ada beberapa bioskop yang cukup berkembang seperti Deli Bioscoop di Kota Banda Aceh, Bioscoop di Bireuen, kemudian ada Bioscoop di Langsa, Tiong Wha Bioscoop di Lhokseumawe, dan Sabang Bioscoop di Sabang, Gemeente Bioscoop di Sigli. Jika berbicara masalah bioskop khususnya di Kota Banda Aceh, maka akan berbicara sejarahnya yang sangat panjang, tercatat bahwa sebelum Perang Dunia II tahun 1930-an,³

No.	Nama	Lokasi
1.	Gedung Teather Kluet	Simpang Empat,Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh 23772
2.	Ex. PHR Angkup	Pepayungen Angkup, Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24773,
3.	Bioskop Gentala	Kec. Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24514
4.	View Drone	Jl. Poros Utama, Lueng Baro, Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Aceh 23671
5.	Rony Media	Jl. Meulaboh – Tapaktuan, Alue Bata, Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Aceh 23671
6.	Adhiaraziq	Desa sago bambong, Sigli, Aceh, Indonesia 24172
7.	VanHauten	Pidie jaya, Banda Aceh, Indonesia 24185
8.	Bioskop Pantikarya	LHOKSEUMAWE, Banda Aceh, Indonesia 55555
9.	Wiraswata	Jln pemuda no 15, Bireuen, Aceh, Indonesia 2421
10.	Suara Hati	Tiro ,Aceh , Pidie, Beureunun, Aceh, Indonesia

Tabel 0.1 : Daftar bioskop yang ada di Aceh sebelum tutup

³ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016, H. 120-128 122.

Banda Aceh merupakan sebuah kota yang lebih maju dibandingkan dengan kota maupun kabupaten lainnya di Provinsi Aceh. Pada tahun 1930-an, komunitas orang Eropa yang bercampur dengan masyarakat Banda Aceh sedikit banyak membuat orang Aceh turut mengikuti gaya hidup orang Eropa, salah satunya ialah menikmati hiburan bioskop. Bioskop di Banda Aceh memiliki sejarah yang amat panjang. Kehadirannya pernah dirasakan sebelum listrik dapat dinikmati di Banda Aceh dan terjadinya Perang Dunia I pada tahun 1914-an. Pada masa ini, film diputar dengan pijar ditembak ke layar yang pemutarannya dilakukan secara manual dengan tangan dan film muncul tanpa warna dan suara. Bioskop banyak dirintis oleh pengusaha Tionghoa dan Bengali atau India yang menganggap bahwa usaha ini merupakan investasi yang menguntungkan. Akan tetapi, kehadirannya tak terlalu menarik atensi dikarenakan masyarakat Aceh tengah berjuang dalam melawan penjajahan Belanda. Terlebih lagi, film-film yang diputar berisi doktrin Negara jajahan dan film asing.

No.	Nama	Lokasi	Tahun Berdiri	Pemilik
1.	Deli Bioscoop	Jl. Mohammad Jam	1930	Bedrijf (B.B)
2.	Rex Bioscope	Peunayong	1930	Keturunan Benggali
3.	Garuda Theatre	Jl. Mohammad Jam	1947	Yusuf Haji Saleh
4.	Merpati	Peunayong	1960	Pengusaha Tionghoa
5.	Gajah Theater	Simpang Lima	1975	Anggota ABRI
6.	Bioskop Elang	Seutui	1978	Bapak Hanifah
7.	Sinar Indah Bioskop	Peunayong	1979	Penguasa Thionghoa
8.	Jeulita Theater	Beurawe I		-

Tabel 0.2 Perkembangan Bioskop di Kota Banda Aceh⁴

Catatan sejarah menyebutkan bahwa bioskop ini telah ada sebelum listrik masuk ke Banda Aceh. Film diputar menggunakan pijar yang ditembak ke layar. Pemutaran dilakukan secara manual dengan tangan. Film yang muncul pun masih tanpa warna dan suara. Karena filmnya bisu, maka dibarisan depan duduk sederetan pemain music sebagai pengisi kebisuan itu. Hingga awal tahun 2000-an, Banda Aceh masih memiliki beberapa bioskop yang beroperasi seperti Sinar Indah Bioskop (SIB) di Peunayong, Jelita Theatre di Beurawe, Garuda Theatre di Jalan Muhammad Jam, Bioskop Gajah Di Simpang lima, Bioskop Merpati di Peunayong dan PAS 21 di Pasar Aceh Shopping Centre.

Salah satu bioskop yang paling bersejarah di Banda Aceh adalah Garuda Theatre, karena pada tanggal 16 Juni 1948 Presiden pertama RI, Ir Soekarno pernah melakukan pidato politik di tempat itu.⁵ Di gedung itu Soekarno membakar semangat perjuangan pemuda Aceh untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Namun seiring dengan berjalannya waktu banyak faktor-faktor yang menyebabkan tutupnya gedung-gedung bioskop di Kota Banda Aceh. Banyak hal mengenai perkembangan bioskop di kota Banda Aceh yang ingin dikaji oleh peneliti karena bioskop sendiri sampai saat ini masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat Aceh.

⁴ Saivana, Rizal. *Sejarah Perkembangan Bioskop di Kota Banda Aceh Tahun 1930-2004*. Banda Aceh FKIP Universitas Syiah Kuala, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016). H. 26.

⁵ Rusdiman, "Bioskop untuk banda aceh". Dikutip dari *tumblr.com*. diakses pada tanggal 28 Januari 2022.

Segelintir orang menganggap bahwa kehadiran bioskop di Banda Aceh biasa memperluas akses maksiat bagi muda-mudi yang belum menikah. Kajian tentang bioskop di Kota Banda Aceh juga belum pernah di tulis, jadi peneliti ingin mengetahui problematika perkembangan bioskop di Kota Banda Aceh dan bagaimana proses jatuh banggunya usaha bioskop sejak mulai berdiri sampai sebelum tsunami melanda.

Di samping itu peneliti juga ingin mengetahui faktor-faktor tutupnya gedung-gedung bioskop serta bagaimana respon masyarakat Aceh terhadap ketiadaan bioskop di Banda Aceh dan mengetahui sampai mana perizinan pembangunan bioskop di Kota Banda Aceh.

Untuk saat ini investasi bioskop di Banda Aceh menjadi sangat mungkin dan menguntungkan dimana pesatnya pembangunan infrastruktur dan pesatnya modal yang masuk ke Banda Aceh bisa diarahakan untuk pembangunan bioskop di Banda Aceh, walaupun sekarang sudah ada beberapa acara pemutaran film alternatif, tapi kutipan tiket penonton, parkir, dan sumber lainnya dapat menambah pemasukan kas daerah.

Persoalan dari pembangunan bioskop di Aceh adalah label anti-syariah yang kerap dikaitkan dengan bioskop. Ada kesan bahwa bioskop tak pernah jauh dari tempat pacaran atau kegiatan mesum. Namum sebenarnya dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 22 Tahun 2002 Tentang “Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Perfilman”. Sudah dijelaskan pada pasal 5, yaitu :

1. Ayat 1 menyebutkan : Setiap usaha perfilman yang di produksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam harus memiliki Izin Usaha Perfilman Provinsi, selanjutnya disingkat IUPP, dari Gubernur.
2. Ayat 2 menyebutkan : Usaha Perfilman yang harus memiliki IUPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu usaha perfilman seluloid di bioskop atau di dalam gedung.

Kehadiran bioskop masih menjadi sebuah mimpi di Aceh. Bagaimana tidak, Aceh belum memiliki tanda-tanda bergerak untuk membangun bioskop. Sampai saat ini, Provinsi yang menerapkan hukum Syariat Islam di Indonesia ini tak kunjung memiliki bioskop sejak tsunami melanda pada tahun 2004 hingga konflik usai. Kendati demikian, bioskop bukanlah barang asing di Aceh karena kehadirannya pernah ada pada tahun 70-an.

Namun, sejak memanasnya konflik yang terjadi pada tahun 1976 sampai 2005, bisnis bioskop gulung tikar secara perlahan-lahan hingga tak berbekas. Kini, bioskop tak mampu bangkit kembalikarena kehadirannya masih terkendala di seputaran izin dan beberapa hal lainnya.⁶

Isu kebutuhan bioskop di Aceh akhirnya mulai bergaung sejak 10 tahun terakhir. Pada awal tahun 2012 silam, masyarakat Aceh mulai mengeluhkan tentang pemerintah yang tak kunjung menghadirkan bioskop di Aceh dengan dalih tidak ada urgensi di dalamnya dan kehadirannya dikhawatirkan bertentangan dengan nilai-nilai Syariat Islam.

⁶ Pernyataan tersebut berasal dari Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas dalam acara Sosialisasi Sensor Mandiri oleh LSF (Lembaga Sensor Film) di Hotel Hermes Palace, pada tanggal 21 Februari 2017.

Masyarakat pun mulai mengutarakan keluhannya di media sosial seperti Facebook, Twitter serta forum-forum lainnya dengan meramaikan tagar #AcehButuhBioskop.⁷ Pertanyaan mengapa Aceh belum memiliki bioskop hingga saat ini belum menjumpai titik terang, pemerintah pun seperti ‘lempar bola’ dalam menanggapi hal tersebut.

Pada masa pemerintahan Wali Kota Illiza Sa’aduddin Jamal pada tahun 2014-2017, beliau menanggapi bahwa untuk menghadirkan bioskop di Aceh harus dilakukan diskusi terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuan para ulama Aceh. Namun, proses tersebut tidak membuahkan hasil dan tidak ada *feedback* yang diberikan untuk masyarakat Aceh.⁸

Kemudian, ketika Wali Kota Aminullah Usman memerintah pada tahun 2017–sekarang, kehadiran bioskop ini sebenarnya telah “dijanjikan” pembangunannya, asal sudah didapatkan pendapat para ulama Aceh dan perizinan dari MPU Aceh (Majelis Permusyawaratan Ulama) terlebih dahulu.

Bahkan beliau, dan tim akan melakukan studi banding ke Arab Saudi dan Negara Islam lainnya untuk melihat urgensi dari penyelenggaraan bioskop.⁹ Akan tetapi, hasil dari studi banding masih nihil dan belum terlihat sampai sekarang. Penyelenggaraan bioskop masih sekedar wacana dan tidak terdapat alasan yang konkret diberikan oleh pemerintah.

⁷ Kegiatan tersebut dilakukan oleh M. Fauzan Febriansyah pada tahun 2013. Dilansir melalui laman <https://bioskopuntukbandaaceh-blog.tumblr.com/> pada tanggal 21/12/2018.

⁸ Angen, Loh Thayeb. 2016. Illiza Main Film, Akankah Bioskop Dibangun di Banda Aceh? Dilansir melalui laman <http://portalsatu.com/read/opini/-12415> pada 31/12/2018

⁹ Disampaikan dalam Program Wali Kota Menjawab yang disiarkan langsung oleh 10 radio swastadi Banda Aceh, Jumat, 16 Maret 2018.

Padahal, Arab Saudi sendiri kini telah memutuskan untuk membuka kembali operasional bioskop di dalam Negeri pada akhir tahun 2017 lalu dan memperbolehkan adanya pembauran kursi duduk antara penonton lelaki dan perempuan.¹⁰

Isu kebutuhan bioskop juga sempat ramai dibicarakan dan menyita perhatian sebagian warga Kota Banda Aceh utamanya anak-anak muda Banda Aceh, ketika salah satu anak muda Banda Aceh mempertanyakan mengapa hingga saat ini Aceh belum memiliki bioskop kepada Presiden Joko Widodo dalam sebuah forum dialog anak muda Aceh yang bergerak di *industry* kreatif pada tahun 2018 silam. Tak hanya itu, ia pun menginginkan agar tanah Serambi Mekkah ini dapat segera menikmati layanan bioskop.¹¹

Presiden Jokowi menanggapinya dengan hal tersebut bukanlah wewenangnya, melainkan Gubernur Aceh. Ketika dilimpahkan pertanyaan tersebut, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah juga mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah wewenangnya, melainkan Wali Kota Banda Aceh, yang pada saat itu dipimpin oleh Aminullah Usman. Kendati demikian, beliau menambahkan bahwa untuk mendirikan bioskop di Aceh membutuhkan persyaratan yang agak spesifik. Namun, beliau tidak menjelaskan persyaratan yang agak spesifik tersebut berbunyi seperti apa.

¹⁰BBC. 2018. Bioskop Pertama Arab Saudi Akan Dibuka Dengan Black Panther, Penonton Lelaki dan perempuan.

¹¹ Sulistiyono, Seno Tri. 2018. Saat Jokowi Limpahkan Pertanyaan Soal Bioskop ke Plt Gubernur Aceh. Dilansir melalui laman <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/saat-jokowi-limpahkan-pertanyaan-soal-bioskop-ke-plt-gubernur-aceh/ar-BBQWYdJ#page=2> pada 31/12/2018

Kebutuhan bioskop di Aceh pun dirasa semakin penting, terlebih lagi daerah lain di Indonesia terus berpacu untuk menghadirkan bioskop, apalagi bila masuk investor asing pasca dibukanya Daftar Negatif Investasi (DNI) oleh pemerintah yang memungkinkan investor asing masuk di sektor perbioskopian.¹²

Jika diamati lebih lanjut, ketiadaan bioskop di Aceh dapat membudayakan perilaku negatif di kalangan anak muda. Mereka akan terdorong untuk mencari dan mengunduh film-film terbaru secara ilegal di internet. Apalagi, hampir di seluruh penjuru Aceh sudah dapat menikmati jaringan internet. Selain itu, ketiadaan bioskop dapat mengarahkan anak muda untuk membeli CD bajakan yang sangat cepat beredar di pasaran ketimbang yang orisinal.¹³ Hal ini tentu saja sangat merugikan insane perfilman dan bertolak belakang dengan apa yang selama ini digaungkan oleh pemerintah untuk mengapresiasi karya seni secara legal.

Jauh dari sebelumnya jika di tinjau dari pandangan Agama Islam bioskop sendiri sudah ada jauh dari zaman sebelum peradaban dimulai, baik itu yang dijelaskan oleh Al-Qur'an maupun Hadist Rasulullah mengenai diperlihatkan dan di pertontonkan amalan selama masih hidup. Allah SWT dan Rasulullah SAW akan melihat amal perbuatan kelak diterangkan juga bahwa perbuatan orang yang hidup akan diperlihatkan kepada kerabat dan keluarganya yang sudah meninggal di dalam barzah.

¹² Wijaya, Herman. Bioskop di Aceh, Perlukah?. 2017. Dilansir melalui laman <http://balaikita.com/bioskop-di-aceh-perlukah/> pada tanggal 21/12/2018.

¹³ fif. *Sudah Saatnya Ada Bioskop di Aceh*. 2018.. Dilansir melalui laman <https://www.merdeka.com/peristiwa/sudah-saatnya-ada-bioskop-di-aceh.html> pada tanggal 13/12/2018.

Sebagaimana diungkapkan Abu Daud Ath-Thayalisi dari hadits Jabir Ibnu Abdullah bahwa Rasulullah bersabda:

إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم في قبورهم ، فإن كان خيرا استبشروا به ، وإن كان غير ذلك قالوا : اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك

"Sesungguhnya amalan perbuatanmu itu diperlihatkan kepada kerabat dan keluargamu di dalam kubur mereka jika perbuatan itu baik mereka bahagia karenanya, jika perbuatannya itu tidak baik maka mereka berkata: Ya Allah berilah mereka Ilham untuk taat kepada-mu."

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Aisyah RA berkata:

إذا أعجبك حسن عمل امرئ ، فقل : اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

"Jika kamu takjub dengan perbuatan baik seseorang maka katakanlah: Kerjakanlah, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang mukmin akan melihat pekerjaanmu."

Masih banyak lagi hadits yang lain yang senada diriwayatkan Imam Ahmad berkenaan dengan perbuatan dan amal manusia. Sementara itu, mengutip Tafsir Al-Jalalain, dijelaskan bahwa:

*"Dan katakanlah kepada mereka manusia berbuatlah sesukamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat perbuatan kamu dan kamu akan dikembalikan dengan membangkitkan kamu kembali kepada Allah Yang Maha mengetahui hal gaib dan yang nyata. Maka Allah akan memberitakan kepada kamu apa yang kamu perbuat, kemudian dia akan memberikan pahala atas perbuatan itu."*¹⁴

Melalui pemaparan di atas, penelitian ini memiliki beberapa urgensi. *Pertama*, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan khazanah keilmuan yang membahas seputar perizinan pembangunan bioskop di Kota Banda Aceh dan mencari tau tanggapan pengiat seni visual tentang tidak adanya bioskop sampai hari ini di Kota Banda Aceh.

¹⁴ Ali Yusuf/Nashin Nashrullah "Apa Maksud Allah dan Rasul-Nya Melihat Amalan Kita Kelak?" Apa Maksud Allah dan Rasul-Nya Melihat Amalan Kita Kelak? | Republika Online. diakses tanggal 14 mei 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian diatas, rumusan masalah yang dapat diambil untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab bioskop di Aceh tidak terlealisasikan sampai saat ini?
2. Bagaimana komunikasi pemerintah terkait pembangunan bioskop di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor penyebab bioskop di Aceh tidak terlealisasikan sampai saat ini.
2. Mengetahui bagaimana komunikasi pemerintah terkait pembangunan bioskop di Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait bagaimana permasalahan pembangun bioskop sampai saat ini belum terealisasikan di daerah Aceh khususnya Kota Banda Aceh, serta menambah referensi karya ilmiah yang dapat berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkait permasalahan bioskop.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca pada umumnya mengenai pentingnya bioskop sebagai sarana media massa yang menyajikan informasi melalui visual perfilman.

- b. Penelitian ini diharapkan akan mampu menjadi referensi kajian terhadap komunikasi massa yang berkaitan permasalahan pembanungan bioskop di Banda Aceh.
- c. Penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengadakan penelitian yang sejenis dan secara lebih mendalam.

E. Penjelasan Konsep/Istilah Penelitian

1. Komunikasi

Dalam buku karangannya yang berjudul “Dinamika Komunikasi”, Onong Uchjana Effendy berpendapat bahwa pengertian komunikasi harus dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pengertian secara umum dan pengertian secara paradigmatis. Pengertian komunikasi secara umum itupun harus juga dilihat dari dua segi, yaitu pengertian komunikasi secara etimologis dan pengertian komunikasi secara terminologis.

Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin *communicatio* yang bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Kata sama yang dimaksudkan adalah sama makna. Jadi dalam pengertian ini, komunikasi berlangsung manakala orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesamaan makna mengenai suatu hal yang tengah dikomunikasikannya itu.

Sebaliknya, jika ada pihak yang tidak mengerti tentang suatu hal yang sedang dikomunikasikan, berarti komunikasi tidak berjalan, dan hubungan antara orang-orang tersebut tidak komunikatif. Pengertian secara terminologis, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan seseorang kepada orang lain.

Pengertian ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang atau manusia, sehingga komunikasi seperti ini disebut sebagai *Human Communication* (komunikasi manusia). Sedangkan pengertian secara paradigmatik, meskipun banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli, namun dari semua definisi itu dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku, baik langsung (komunikasi tatap muka) maupun tidak langsung (komunikasi melalui media).¹⁵

2. Pembangunan

Siagian memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.”

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan *industrialisasi*, bahkan pembangunan dengan *westernisasi*.

¹⁵Zikri Fachrul Nurhadi1, Achmad Wildan, *Kajian Tentang Efektivitas Pesan Dalam Komunikasi*, Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran Dan Penelitian, 2017, Volume. 3 No. 1, H. 91

Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan *modernisasi* serta *industrialisasi*, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan atau perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.¹⁶

3. Gedung Bisokop

Bioskop merupakan wadah bagi masyarakat untuk menikmati pertunjukan film, dimana penonton mencurahkan segenap perhatiannya dan perasaannya kepada gambar hidup yang disaksikan. Film merupakan salah satu karya seni yang lahir dari suatu kreativitas dan imajinasi orang-orang yang terlibat dalam proses penciptaan gambar bergerak tersebut. Lewat film, informasi dapat dikonsumsi dengan lebih mendalam karena film adalah media audio visual.

¹⁶ Kumba Digdowiseiso, Teori Pembangunan, (Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2019), H. 7-11

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang relevan bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Rizal Saivana, Mawardi , dan Zainal (2016)

Jurnal yang ditulis oleh Mahasiswa FKIP Unsyiah Jurusan Sejarah, Rizal Saivana, Mawardi, dan Zainal berjudul “Perkembangan Bioskop Di Kota Banda Aceh (1930-2004)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan bioskop, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat perkembangan bioskop, dan untuk mengetahui faktor-faktor tutupnya gedung-gedung bioskop di Kota Banda Aceh sejak tahun 1930 hingga tahun 2004. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan jenis penelitian ialah penelitian sejarah (*History*). Sumber diperoleh dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Kota Banda Aceh, dan Badan Pusat Statistik Aceh.

Cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen tentang bioskop serta wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan bioskop di Kota Banda Aceh mengalami kemajuan dari tahun ke tahun dengan berdirinya 9 bioskop dari tahun 1930 hingga tahun 2004.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat perkembangan bioskop di Kota Banda Aceh yaitu adanya desakan masyarakat yang kontra terhadap kehadiran bioskop di kota Banda Aceh dan diberlakukannya Qanun Syariat Islam di Aceh. Penyebab tutupnya bioskop di Kota Banda Aceh yaitu faktor konflik Aceh serta faktor beredarnya televisi dan faktor beredarnya VCD bajakan.¹⁷

2. Jurnal yang ditulis oleh Denny Agung, Jawas, Syaiful Muazir (2021)

Jurnal yang ditulis oleh Mahasiswa, Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura, Denny Agung, Jawas, Syaiful Muazir yang berjudul “Perancangan Gedung Bioskop Di Kota Sintang”. Salah satu Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, aktivitas penduduk terpadat, dan perekonomian yang menunjang, adalah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah penduduk 413.369 jiwa pada tahun 2018. Meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Sintang setiap tahun mengakibatkan tingginya tingkat aktivitas kerja dan mempengaruhi keinginan untuk pergi ke tempat hiburan, rekreasi dan wisata.

Banyak tempat yang dapat di kunjungi di Kabupaten Sintang, salah satunya adalah wisata Bukit Kelam. Pada era teknologi saat ini gedung bioskop merupakan salah satu solusi tempat hiburan, dimana penonton bisa mencurahkan segenap perhatiannya dan perasaannya kepada gambar hidup yang disaksikan.

¹⁷Rizal Saivana, Mawardi, dan Zainal, “Perkembangan Bioskop Di Kota Banda Aceh (1930-2004)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 2016, Vol. 1, No. 1, hlm. 120. Diakses pada tanggal 25 April 2022.

Dengan itu, perancangan gedung bioskop yang berada di Kabupaten Sintang menjadi solusi untuk memberikan wadah bagi masyarakat. Bangunan gedung bioskop, memiliki daya tarik dari bentuk bangunan yang dinamis dengan berbentuk segi empat yang mengikuti konsep dari bentuk proyektor dengan penggunaan warna kayu agar tampak lebih elegan.

Pada bagian bangunan perancang menambahkan ornamen Dayak dan Melayu yang merupakan unsur konsep perancangan gedung bioskop agar tidak terlepas dari unsur kebudayaan. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan literatur atau informasi maupun referensi mengenai gedung bioskop yang dapat diperoleh melalui media elektronik, media massa, dan literatur lainnya. Tahap pengumpulan data adalah tahap mengumpulkan data-data atau referensi yang berkaitan dengan perancangan dengan judul proyek tugas akhir.¹⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Rifar Manani (2020)

Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Program Studi Arsitektur, Rifar Manani yang berjudul “Perancangan Bioskop Menggunakan Pendekatan Arsitektur Islam Di Banda Aceh”. Pada saat ini dunia perfilman Indonesia berkembang semakin pesat, maka untuk mendukung perkembangan tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai contohnya gedung bioskop. Gedung bioskop merupakan salah satu tempat untuk menonton film.

¹⁸Denny Agung Prasetyo, J.D, S.M, Perancangan Gedung Bioskop Di Kota Sintang, Jurnal Mosaik Arsitektur, 2021, Vol. 9, No. 1, H. 327

Untuk itu dengan adanya kembali gedung bioskop di Banda Aceh yang baru maka masyarakat Aceh khususnya dan masyarakat di luar Aceh pada umumnya dapat menonton film di gedung bioskop ini. Karena ketiadaan bioskop di Aceh membuat masyarakat Aceh memilih untuk menonton bioskop keluar Kota, karena itu perlu dibangunnya bioskop di Aceh guna meningkatkan perekonomian di Aceh dari pajak pendapatan bioskop. Tujuan Menciptakan suatu desain yang mampu bersaing sebagai fasilitas hiburan gedung bioskop bagi masyarakat Aceh dan sekitarnya dan dapat diterima oleh masyarakat. Pendekatan yang digunakan pada perancangan ini adalah arsitektur Islam yang menggunakan konsep Arsitektur Islam menurut Al-qur'an dan Hadist.¹⁹

4. Skripsi yang ditulis oleh Cut Khairina Rizky (2020)

Skripsi Cut Khairina Rizky mahasiswi Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada berjudul “Bioskop dan Anak Muda Aceh: Studi tentang Gerakan Anak Muda Banda Aceh terhadap Ketiadaan Bioskop di Provinsi Aceh”. Berawal dari ketiadaan bioskop di Aceh, pascatsunami, dan pemberlakuan Syariat Islam, membuat anak muda Aceh bergerak untuk melakukan gerakan. Anak muda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak muda yang tergabung dalam lima komunitas dan gerakan kolektif yang bergerak dalam bidang budaya dan perfilman, yakni Liga Kebudayaan Komunitas Tikar Pandan, Aceh Menonton, Kotak Hitam Aceh, Yayasan Aceh Documentary, dan Komunitas Trieng.

¹⁹Rifar Manani, Perancangan Bioskop Menggunakan Pendekatan Arsitektur Islam Di Banda Aceh, Fakultas Sains Dan Teknologi Uin Ar-Raniry, 2020

Dengan demikian, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana respon dan gerakan yang dilakukan oleh anak muda Banda Aceh, yakni komunitas dan gerakan kolektif seni kebudayaan dan film terhadap ketiadaan bioskop. Studi ini menganalisis respon dan bentuk gerakan sosial yang dilakukan dengan melihat latar belakang, proses, dan hasil dari serangkaian upaya yang dilakukan oleh kelima komunitas dan gerakan kolektif tersebut.

Penelitian ini menggunakan studi kualitatif dengan metode studi kasus yang melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Konsep gerakan sosial baru oleh Rajendra Singh digunakan sebagai pisau analisis yang hasilnya mengungkapkan bahwa gerakan sosial yang dilakukan berupa strategi kreatif untuk menghidupkan ekosistem perfilman di Aceh alih-alih sekedar mengupayakan hadirnya bioskop di Aceh.

Gerakan sosial baru termanifestasi dalam bentuk kegiatan publik terbuka yang teraktualisasi dalam empat hal, yakni; bioskop alternatif, akses dalam menonton, pilihan film yang diputar, serta dampak perubahan untuk pihak yang menjadi sasarannya. Pada studi ini, dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial baru yang dilakukan berupa strategi kreatif sebagai upaya dalam menghidupkan suasana perfilman di Aceh yang meredup.²⁰

²⁰ Cut Khairina Rizky, *Bioskop dan Anak Muda Aceh: Studi tentang Gerakan Anak Muda Banda Aceh terhadap Ketiadaan Bioskop di Provinsi Aceh*, Universitas Gadjah Mada, 2020.

B. Komunikasi

1. Pengertian Komunikasi

Seperti telah disebutkan pada bab sebelumnya istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris *communication* berasal dari kata Latin *communicatio*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Hal yang senada diungkapkan oleh Hafied Cangara, komunikasi berpangkal pada perkataan Latin *communis* yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih.

Secara terminologi, para ahli komunikasi memberikan pengertian komunikasi menurut sudut pandang dan pendapat mereka masing-masing diantaranya: Dani Vardiansyah mengungkapkan beberapa definisi komunikasi secara istilah yang dikemukakan para ahli:²¹

- a. Jenis & Kelly menyebutkan “Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya (khalayak)”.
- b. Berelson & Stainer “Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain”.

²¹Dani Vardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Cet. II (Jakarta: PT Indeks, 2008) H. 25-26.

2. Bentuk-Bentuk Komunikasi

Susanto menyatakan bahwa ada lima konteks komunikasi, yaitu: komunikasi intrapersonal (*intrapersonal communication*), komunikasi antarpersonal (*interpersonal communication*), komunikasi kelompok (*group communication*), komunikasi organisasi (*organizational communication*) dan komunikasi massa (*mass communication*).²²

Komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Komunikasi ini umumnya membahas proses pemahaman, ingatan dan *interpretasi* terhadap simbol yang ditangkap melalui panca indera. Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa komunikasi ini merupakan komunikasi yang terjadi terhadap diri sendiri, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja.

Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi merupakan proses dimana orang menciptakan dan mengelola hubungan mereka, melaksanakan tanggung jawab secara timbal balik dalam menciptakan makna. Lebih lanjut komunikasi antar pribadi merupakan rangkaian sistematis perilaku yang bertujuan yang terjadi dari waktu ke waktu dan berulang kali.²³ Komunikasi perorangan yang dalam hal ini bersifat pribadi, baik secara langsung tanpa medium, atau pun langsung melalui medium. Contoh percakapan tatap muka (*face to face communication*), percakapan melalui telepon, surat menyurat.

²²Eko Harry Susanto, *Komunikasi Manusia Esensi dan Aplikasi dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik*, Edisi. I, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), H. 6-12.

²³Muhammad Budyatna dan Leila Mona Ganiem, *Teori Komunikasi Antarpribadi*, Cet. I, Edisi. I, (Jakarta: Kencana, 2011), H. 14.

Richard L Weaver memberikan karakteristik dalam komunikasi antar pribadi yaitu: melibatkan paling sedikit dua orang, adanya umpan balik atau *feedback* , tidak harus tatap muka, tidak harus bertujuan, menghasilkan beberapa pengaruh atau *effect*. Tidak harus melibatkan atau menggunakan kata-kata, dipengaruhi oleh konteks.²⁴

Komunikasi kelompok menitikberatkan pembahasan pada interaksi di antara orang-orang dalam kelompok kecil, yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Ada perbedaan pendapat tentang jumlah orang dalam kelompok kecil, misalnya ada yang berpendapat maksimal lima sampai tujuh orang, tetapi semuanya sepakat bahwa kelompok kecil harus terdiri dari minimal tiga orang. Komunikasi kelompok berkisar kepada dinamika kelompok, efisiensi dan efektivitas penyampaian informasi dalam kelompok, pola atau bentuk interaksi, serta pembuatan keputusan dalam kelompok dikenal juga kohesif yaitu sebuah rasa kebersamaan dalam kelompok sinergi sebagai proses dari berbagai sudut pandang untuk mengatasi berbagai permasalahan.

Komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi.²⁵ Komunikasi organisasi melibatkan komunikasi formal, informal, komunikasi interpersonal maupun komunikasi kelompok.

²⁴Muhammad Budyatna, *Teori Komunikasi...*, H. 15-18

²⁵Khomsahrial Romli, *Komunikasi Organisasi Lengkap*, Cet. I, Edisi. I (Jakarta:Grasindo, 2011), H. 2.

Pembahasan dititik beratkan kepada struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian serta budaya organisasi.

Ada tiga fungsi umum komunikasi organisasi yaitu, (1) produksi dan pengaturan, (2) pembaharuan (*innovation*) dan (3) sosialisasi dan pemeliharaan (*socialization and maintenance*). Dari fungsi tersebut pada dasarnya komunikasi memiliki eksistensi yang kuat terhadap dinamika organisasi. Dengan kata lain, komunikasi merupakan faktor yang berperan dalam perkembangan atau kemunduran organisasi.

Komunikasi massa merupakan proses penciptaan makna yang sama diantara media massa dan para komunikannya.²⁶ Proses komunikasi massa melibatkan aspek komunikasi intrapersonal, komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Teori komunikasi massa umumnya memfokuskan pada struktur media, hubungan media dan masyarakat, hubungan antara media dan khalayak, aspek budaya dari komunikasi massa serta dampak hasil komunikasi massa terhadap individu.

Selain itu Werner J. Severin dan James W. Tankard menurut mereka tujuan dari teori komunikasi massa yang lebih spesifik ialah:²⁷

²⁶Stanley J. Baran, *Introduction to Mass Communication Media Literacy and Culture*, Edition. 5, (New York: McGraw-Hill, 2009) h. 6.

²⁷Werner J. Severin dan James W. Tankard, *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*, Cet. V, Edisi. V, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 13-14.

- a. Untuk menjelaskan pengaruh-pengaruh komunikasi massa. Pengaruh ini mungkin yang kita harapkan seperti pemberitaan kepada masyarakat selama pemilihan, atau yang tidak diharapkan, seperti menyebabkan peningkatan kekerasan dalam masyarakat.
- b. Untuk menjelaskan manfaat komunikasi massa yang digunakan masyarakat. Dalam beberapa hal, melihat manfaat komunikasi massa oleh masyarakat menjadi lebih bermakna daripada melihat pengaruhnya. Pendekatan ini mengakui adanya peranan yang lebih aktif pada audiens komunikasi. Setidaknya ada dua faktor yang digabung untuk memberi tekanan yang lebih besar pada aktivitas audiens dan penggunaan komunikasi massa dari pada pengaruhnya. Salah satu faktornya adalah bidang psikologi kognitif dan pemrosesan informasi. Faktor lain adalah perubahan teknologi komunikasi yang bergerak menuju teknologi yang semakin tidak tersentralisasi, pilihan pengguna yang lebih banyak, diversitas isi yang lebih besar, dan keterlibatan yang lebih aktif dengan isi komunikasi oleh pengguna individual.
- c. Untuk menjelaskan pembelajaran dari media massa.
- d. Untuk menjelaskan peran media massa dalam pembentukan pandangan-pandangan dan nilai-nilai masyarakat. Para politisi dan tokoh masyarakat sering memahami pentingnya peran komunikasi massa dalam pembentukan nilai-nilai dan pandangan dunia. Kadang-kadang mereka mungkin membesar-besarkan suatu masalah dan ikut mengkritik acara-acara atau film yang didasarkan hanya pada spekulasi.

3. Hambatan Komunikasi

Dalam pelaksanaan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal seringkali tidak semua pesan dapat diterima dan di mengerti dengan baik. Hal ini di sebabkan oleh adanya factor penghambat komunikasi antara pengirim dan penerima pesan. Beberapa faktor penghambat dalam proses komunikasi adalah:

- a. Masalah dalam mengembangkan pesan di karenakan munculnya keraguan tentang isi pesan, kurang terbiasa dengan situasi yang ada atau dengan orang yang akan menerima. Disamping itu, dimungkin juga adanya pertentangan emosi, atau kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan.
- b. Masalah media sebagai alat dalam proses penyampaian pesan.
- c. Masalah dalam menerima pesan dapat terdeteksi seperti persaingan antara penglihatan dengan pendengaran/suara, suasana yang tidak nyaman, lampu yang mengganggu, konsentrasi yang tidak terpusat.
- d. Masalah dalam menafsirkan pesan dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang, penafsiran makna, perbedaan reaksi emosional dan lain sebagainya.²⁸

²⁸Zaenal Mukarom, *Teori-Teori Komunikasi*, (Bandung: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati, 2020), H. 18-19.

D. Pembangunan

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan.

Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan.

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Portes mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.²⁹

Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan yang berubah dari dataran sehingga menghasilkan satu bangunan.

²⁹Kumba Digdowiseiso, Teori Pembangunan..., H. 7

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para Ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah. Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan.

Seiring dengan perkembangannya hingga saat ini belum ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut. Akan tetapi untuk dapat membedakan keduanya tanpa harus memisahkan secara tegas batasannya, Siagian (1983) dalam bukunya Administrasi Pembangunan mengemukakan,

“Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan atau perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Dari sejarah perubahan dalam mengkonseptualisasikan pembangunan, terdapat berbagai variasi cara mendefinisikan pembangunan. Mula-mula pembangunan hanya diartikan dalam arti ekonomi, namun berkembang pemikiran, bahwa pembangunan tidak hanya diartikan dalam arti ekonomi, tetapi pembangunan dilihat sebagai suatu konsep yang dinamis dan bersifat multidimensional atau mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti; ekonomi, politik, sosial budaya, dan sebagainya.

Berbagai istilah yang sering digunakan saling bergantian dalam menjelaskan pengertian pembangunan, seperti; perubahan, pertumbuhan, kemajuan, dan modernisasi. Akan tetapi istilah-istilah tersebut tidak sama makna dari arti pembangunan, karena pembangunan merupakan rujukan semua yang baik, positif, dan menyenangkan. Sementara perubahan, pertumbuhan, kemajuan, maupun modernisasi dapat saja terjadi tanpa unsur pembangunan.

Dilihat dari arti hakiki pembangunan, pada dasarnya menekankan pada aspek nilai-nilai kemanusiaan, seperti; menunjang kelangsungan hidup atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, harga diri atau adanya perasaan yang layak menghormati diri sendiri dan tidak menjadi alat orang lain.

Selain itu, arti pembangunan yang paling dalam adalah kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya, yang mencakup; kapasitas, keadilan, penumbuhan kuasa dan wewenang, dan saling ketergantungan. Maka dari itu pembangunan dan konsep arsitektur bioskop di Kota Banda Aceh dapat ditinjau dari aspek Islam. Pembangunan dan Konsep Arsitektur Menurut Pandangan Islam Ada beberapa pendekatan arsitektur Islam. Menurut Nangkula Utaberta dalam bukunya arsitektur Islam, pemikiran, diskusi dan pencarian bentuk, ada 5 pendekatan arsitektur Islam, yaitu:

- a. Pendekatan *populis revivalisme*,
- b. Pendekatan ekletik sejarah,
- c. Pendekatan *regionalisme* kawasan,
- d. Pendekatan *metafora* dan kejujuran struktur,
- e. Pendekatan arsitektur Islam melalui studi nilai-nilai asasi dari Islam seperti Al-qur'an dan Sunah.³⁰

Pendekatan *populis revivalisme* merupakan pendekatan yang berupaya menghidupkan atau membangkitkan kembali, sebagaimana jika sesuatu yang telah mati maka kita akan berupaya menghidupkan kembali. Jadi objeknya haruslah sesuatu yang pernah ada sebelumnya dan dianggap berhasil sehingga perlu dan layak untuk dihidupkan kembali.

³⁰ Kumba Digdowiseiso, Teori Pembangunan..., H.. 9-12.

Pendekatan ekletik sejarah merupakan bentuk peniruan terhadap sebagian elemen atau keseluruhan dari arsitektur di masa lampau atau masa kini, selain itu ekletik lebih berbicara tentang metode dan aplikasi dari perancangan. Pendekatan regionalisme kawasan pendekatan ini lebih melihat konteks lingkungan dari bangunan dengan segala kondisi fisik dan sosial-budaya yang ada sebagai sebuah elemen yang lebih penting dari sekedar usaha simbolisasi dan pembentukan citra dari Islam itu sendiri.

Pendekatan metafora dan kejujuran struktur pendekatan metafora merupakan suatu upaya mengambil simbolisasi dari suatu elemen atau suatu aspek dari Islam yang dianggap mewakili untuk digunakan dalam bangunan. Simbolisasi ini digunakan untuk membahas pesan dan ide yang akan disampaikan dan melihat sebagai sesuatu yang lebih bermakna.

Kejujuran struktur berbicara tentang ide memperlihatkan struktur secara jujur dan ide tentang keindahan yang lahir dari struktur bangunan. Pendekatan arsitektur Islam melalui studi nilai-nilai asasi dari Islam seperti Al-qur'an dan sunah, pendekatan ini melakukan pendekatannya dengan melihat ide, nilai, dan prinsip Islam melalui sumber-sumber Agamanya. Metode ini memadukan antara ilmu tentang Islam dengan segala aspeknya ke dalam arsitektur sebagai suatu kesatuan yang lebih mendukung dan berkaitan satu sama lainnya.³¹

³¹ Kumba Digdowiseiso, Teori Pembangunan..., H.. 13-14.

Dalam perancangan sebuah masjid misalnya, pendekatan ini lebih melihat aspek nilai daripada aspek kebendaan pada simbolisasi atau gaya perancangan dengan mempertanyakan berbagai aspek fungsional dari masjid tersebut. Oleh karena itu, perancangan ini menggunakan pendekatan terakhir karena pendekatan ini melihat nilainya bukan melihat bentuk maupun fisiknya.³²

E. Gedung Bioskop

1. Pengertian Bioskop

Kata bioskop berasal dari kata *bioscoop* (bahasa Belanda yang juga berasal dari Bahasa Yunani) adalah tempat bagi masyarakat untuk menonton pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar. Gambar film diproyeksikan ke layar menggunakan proyektor. Bioskop merupakan salah satu dari banyak alternatif seseorang untuk berekreasi. Fasilitas maupun teknologi pada gedung bioskop pun sangat menentukan kepuasan masyarakat yang mengunjungi bioskop untuk mendapatkan hiburan. Bioskop adalah pertunjukan yang diperlihatkan dengan gambar (film) yang disorot sehingga bergerak (berbicara).³³

Bioskop adalah tempat untuk pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar, gambar film di proyeksikan layar menggunakan proyektor. Bioskop pertama di Indonesia berdiri pada desember 1900, di jalan Tanah Abang satu, Jakarta pusat, karcis kelas satu harganya dua golden (perak) dan harga karcis kelas dua setengah perak.

³² Rifai Manani, Perancangan Bioskop Menggunakan Pendekatan Arsitektur Islam Di Banda Aceh, Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Ar-Raniry, 2022

³³ KBBi edisi V

Bangunan bioskop masa itu menyerupai bangsal dengan dinding dari gedek dan beratapkan kaleng atau seng, setelah selesai pemutaran film biokop itu kemudian dibawa keliling ke kota yang lain. Bioskop ini dikenal dengan nama Talbol Bioskop lain diusahakan oleh seorang yang bernama Schwarz. Tempatnya terletak kira-kira di Kebon Jahe, Tanah Abang. Sebelum akhirnya hancur terbakar, bioskop ini menempati sebuah gedung di Pasar Baru.

Ada lagi bioskop yang bernama *Jules Francois de Calonne* yang terdapat di Deca Park. Film-film yang diputar di dalam bioskop tempo dulu adalah film gagu alias bisu atau tanpa suara. Biasanya pemutaran di iringi musik orkes, yang ternyata jarang nyambung dengan film. Beberapa film yang kala itu yang menjadi favorit masyarakat adalah *Fantomas, Zigomar, Tom Mix, Edi Polo, Charlie Caplin, Max Linder, Arsene Lupin, dll.*³⁴

2. Bioskop Dalam Pandangan Islam

a. Hukum Menonton Bioskop Dalam Islam

Dalam dunia modern yang serba canggih ini, informasi bisa didapat dan dapat mengetahui serta mengalami sendiri kemajuan jaman di bidang teknologi yang layak untuk kita ketahui karena segala ilmu tentu ada manfaat dan keberkahannya, termasuk diciptakannya film, tentu di dalamnya menyimpan kebaikan jika dijalankan dan digunakan untuk kebaikan sesuai Syariat Islam dan tidak mendekati pelanggaran norma-norma.

³⁴Dewi Irini, Sejarah Industri Perfilman Indonesia, (Banda Aceh: Badan Pelestarian Nilai Budaya, 2011), H. 70.

Hukum menonton film dalam Islam ialah tidak memiliki ketetapan khusus, yakni berdasarkan isi dan niat film yang ditonton tersebut. sebagaimana kita mengetahui tentu tetap ada film yang mengajarkan motivasi, atau memberi manfaat ilmu dalam pandangan Islam.

b. Isi dari Film yang Ditonton

Islam sebagai agama yang telah sempurna dan lengkap dan telah memiliki dasar hukum Islam tentu saja mengatur hal ini dengan sedemikian rupa. Secara jelas Islam telah mewajibkan kepada kaum mukmin laki-laki dan kaum mukmin perempuan untuk menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Syara'. Allah swt Berfirman, yang artinya:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".³⁵ (TQS. Al-Nur [24]: 30-31).

Dari firman Allah tersebut, jelas bahwa menonton film di bioskop, di perbolehkan atau tidak ialah berdasarkan dari isi film yang ditonton tersebut, jika berisi tentang kebaikan, misalnya tentang sejarah Islam, tentang kebesaran Allah, tentang pentingnya mengenal Allah, dan sebagainya yang dapat meningkatkan rasa keimanan kita kepadaNya.

³⁵ (Al-Nur [24]: 31).

Dari paparan di diatas, Islam sama sekali tidak melarang setiap individu untuk menonton bioskop dalam konteks film yang bernuansa Islam. Berikut beberapa film bernuansa Islam yang laris ditonton diseluruh bioskop di Indonesia.

- 1) Bulan Terbelah di Langit Amerika 2 (2016)
- 2) Ada Surga di rumahmu (2015)
- 3) Ayat-ayat Cinta (2013)
- 4) Sang Pencerah (2010)
- 5) Perempuan Berkalung Sorban (2009)
- 6) Negeri 5 Menara (2012)
- 7) Hafalan Shalat Delisa (2011)
- 8) 99 Cahaya di langit Eropa (2013)
- 9) Haji Backpacker (2014)

Namun jika film yang ditonton lebih banyak keburukan di dalamnya, seperti banyak wanita atau pria yang tidak menutup aurat hingga membuat orang yang menonton melihatnya sama saja hal tersebut adalah zina mata walaupun tidak melihat orangnya secara langsung, tetap saja ia melihat sesuatu yang buruk.³⁶ Jangan sampai terjadi persentuhan dan percampuran antara laki-laki dan perempuan lain, demi menjaga fitnah dan menolak syubhat. Lebih-lebih pertunjukan ini tidak dapat dilakukan, kecuali di tempat yang gelap.

³⁶ Syekh Muhammad Yusuf Qardhaw, *Syekh Muhammad Yusuf Qardhaw, Alih Bahasa: H. Mu'ammal Hamidy* (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), H. 296.

Sedang hadist Nabi mengatakan: "Sungguh kepala salah seorang di antara kamu ditusuk dengan jarum dari besi, lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya."(Riwayat Baihaqi, Thabarani; dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi Bukhari)³⁷

F. Teori Yang Digunakan

1. Teori Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi menurut Wiryanto (dalam Khomsahrial Romli, 2011) adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang di setujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi.

Isinya berupa cara kerja didalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang di setujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual.

Adapun menurut Arni Muhammad (2009) bahwa komunikasi organisasi juga dapat di definisikan sebagai proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling bergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah.

³⁷ Syekh Muhammad Yusuf Qardhaw, Syekh Muhammad Yusuf Qardhaw, Alih Bahasa: H. Mu'ammal Hamidy (Sumatra Barat: Bina Ilmu, 1993), H. 297.

S. Djuarsa (2007) dalam bukunya “Teori komunikasi” bahwa komunikasi organisasi adalah komunikasi antar manusia (*human communication*) yang terjadi dalam konteks organisasi. Oleh karena itu, ketika organisasi dianggap sekedar sekumpulan orang yang berinteraksi.

Maka komunikasi organisasi akan berpusat pada simbol-simbol yang akan memungkinkan kehidupan suatu organisasi, baik berupa kata-kata atau gagasan-gagasan yang mendorong, mengesahkan mengkoordinasikan dan mewujudkan aktivitas yang terorganisir dalam situasi-situasi tertentu. Korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada peninjauannya yang terfokus kepada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi itu. Ilmu komunikasi mempertanyakan bentuk komunikasi apa yang berlangsung dalam organisasi, metode dan teknik apa yang di pergunakan, media apa yang di pakai, bagaimana prosesnya, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat, dan sebagainya.

Adapun berdasar pada berbagai literature terkait dengan definisi komunikasi organisasi ini maka fungsi penting komunikasi organisasi menurut Brent D. Ruben Dalam Alo Liliweri, (2004) yakni sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan aktivitas individu, kelompok atau unit-unit lain dalam organisasi.
- b. Memberikan pengarahan organisasi secara keseluruhan.
- c. Memfasilitasi pertukaran informasi dalam organisasi.

d. Menjamin adanya arus timbal balik (*two way flow information*) antara organisasi dan lingkungan eksternal (di luar) organisasi.³⁸

2. Hambatan-Hambatan Dalam Komunikasi Organisasi

Komunikasi yang terjadi dalam organisasi atau lembaga tentunya tidak terlepas dari hambatan. Hambatan inilah yang kemudian yang dapat mengganggu proses komunikasi dan menimbulkan noise. Menurut Harun (2008) bahwa hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

a. Latar Belakang (*Frame of Reference*)

Orang yang berbeda-beda dapat menafsirkan pesan komunikasi yang sama secara berbeda-beda pula tergantung dari pengalaman mereka sebelumnya. Hal ini yang kemudian menyebabkan perbedaan proses pembuatan dan penguraian sandi. Para ahli komunikasi sependapat bahwa hal inilah yang menjadi faktor paling penting yang dapat mengganggu kesamaan dalam komunikasi (*commonness*).³⁹

b. Mendengarkan Secara Selektif

Ini merupakan bentuk persepsi yang selektif yang mana seseorang cenderung mengaburkan informasi baru, khususnya jika informasi tersebut bertentangan dengan kepercayaannya, maka seseorang tersebut hanya akan memperhatikan hal-hal yang memperkuat kepercayaannya.

³⁸ Opan Arifudin, Teori-teori Dalam Komunikasi Organisasi, H. 114

³⁹ Opan Arifudin, Teori-teori Dalam Komunikasi Organisasi, H. 118

c. Pertimbangan Nilai (*Value Judgements*)

Dalam setiap situasi komunikasi, penerima akan mengadakan pertimbangan nilai. Pada dasarnya pertimbangan ini menyangkut pemberian nilai menyeluruh kepada sebuah pesan sebelum menerima seluruh komunikasi.

b. Dapat dipercayanya Sumber (*Source Credibility*)

Dapat dipercayanya sumber merupakan keyakinan, kepercayaan, keyakinan dan pengakuan penerima terhadap pesan dan tindakan komunikator. Tingkat kepercayaan penerima kepada komunikator selanjutnya langsung mempengaruhi pandangan dan reaksi penerima terhadap perkataan, gagasan, dan tindakan komunikator.

c. Persoalan Bahasa (*Semantic Problem*)

Hal ini disebabkan karena kadang kata-kata mempunyai arti yang berbeda bagi orang yang berbeda-beda pula, maka dari itu sangat dimungkinkan bagi komunikator untuk berbicara dalam bahasa yang sama dengan komunikan.⁴⁰

d. Penyaringan (*Filtering*)

Penyaringan atau filtering biasa terjadi dalam arus komunikasi ke atas dalam organisasi atau lembaga. Penyaringan ini berhubungan dengan “manipulasi” informasi sedemikian sehingga informasi dapat ditangkap secara positif oleh penerimanya.

⁴⁰ Opan Arifudin, *Teori-teori Dalam Komunikasi Organisasi*, H. 115. Diakses Pada Tanggal 28 April 2022.

e. Perbedaan Status (*Status Differences*)

Sering kali organisasi atau lembaga menjelaskan tingkat-tingkat hierarkis melalui berbagai simbol seperti gelar atau titel, kantor, dan sebagainya. Perbedaan status semacam inilah yang dapat menimbulkan ancaman bagi seseorang yang lebih rendah kedudukannya dalam hierarki.

f. Tekanan Waktu (*Time Pressures*)

Tekanan waktu merupakan hambatan penting bagi komunikasi. Kortsleting merupakan kegagalan dari sistem komunikasi yang ditentukan secara formal, yang seringkali diakibatkan oleh tekanan waktu. Ini berarti bahwa ada seseorang yang ditinggalkan dari saluran resmi komunikasi yang biasanya harus dimasukkan.

3. Strategi Komunikasi Organisasi

Strategi komunikasi pada hakikatnya merupakan perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai satu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Menurut Effendi (2003) strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai satu tujuan. Menyusun sebuah strategi komunikasi merupakan suatu seni, bukan suatu yang ilmiah dan ada banyak cara pendekatan yang berbeda untuk melakukan tugas ini. Seperti halnya strategi dalam bidang apapun, strategi komunikasi harus di dukung oleh teori, karena teori merupakan pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah diuji kebenarannya.

Menurut Ruslan (2002) menyatakan agar suatu strategi dapat efektif dilaksanakan dalam sebuah program, maka ia harus mencakup beberapa hal :

- a. Objektif yang jelas dan menentukan semua ikhtiar diarahkan untuk mencapai pemahaman yang jelas, menentukan dan bisa mencapai keseluruhan tujuan. Tujuan tersebut tidak perlu dibuat secara tertulis namun yang penting bisa dipahami dan menentukan.
- b. Memelihara inisiatif, perlu diketahui bahwa strategi inisiatif menjaga kebebasan bertindak dan memperkaya komitmen. Strategi harus menentukan langkah dan menetapkan tindakan terhadap peristiwa, bukannya bereaksi terhadap peristiwa.
- c. Konsentrasi, dengan memusatkan kekuatan yang besar untuk waktu dan tempat yang menentukan.
- d. Strategi hendaknya diniatkan untuk dilengkapi penyangga dan dimensi untuk fleksibilitas dan manuver.
- e. Strategi hendaknya memberikan kepemimpinan yang memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan pokok.
- f. Strategi hendaknya dipersiapkan untuk memanfaatkan kerahasiaan dan kecerdasan untuk menyerang lawan pada saat yang tidak terduga.
- g. Strategi itu mengamankan seluruh organisasi dan semua operasi penting organisasi.

4. Dimensi Komunikasi Organisasi

Untuk melihat komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi dapat terlihat dari dimensinya. Menurut Onong Uchjana Effendy (2007), terdapat dua dimensi komunikasi dalam kehidupan organisasi antara lain sebagai berikut:

a. Komunikasi Internal

Organisasi sebagai kerangka (*framework*) menunjukkan adanya pembagian tugas antara orang-orang di dalam organisasi itu dan dapat di klasifikasikan sebagai tenaga pimpinan dan tenaga yang di pimpin. Untuk menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan tujuan yang akan dicapai, ketua dan pengurus mengadakan peraturan sedemikian rupa sehingga tidak perlu berkomunikasi langsung dengan seluruh anggota.

Anggota membuat kelompok-kelompok menurut jenis pekerjaannya dan mengangkat seseorang sebagai penanggung jawab atas kelompoknya. Dengan demikian, pimpinan cukup berkomunikasi dengan para penanggung jawab kelompok. Jumlah kelompok serta besarnya kelompok bergantung pada besar kecilnya organisasi.⁴¹

Dimensi komunikasi internal terdiri dari komunikasi vertikal dan horizontal yakni sebagai berikut :

1) Komunikasi Vertikal

Komunikasi vertikal yakni komunikasi dari atas ke bawah (*downward communication*) dan komunikasi dari bawah ke atas (*upward communication*) yang merupakan komunikasi dari pimpinan kepada

⁴¹ Opan Arifudin, Teori-teori Dalam Komunikasi Organisasi, H. 117.

bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik (*two-way traffic communication*). Dalam komunikasi vertikal, pimpinan memberikan instruksi, petunjuk, informasi dan penjelasan kepada bawahannya.

Dalam komunikasi dari bawahan ke pimpinan, bawahan memberikan laporan, saran serta pengaduan kepada pimpinan. Komunikasi dua arah secara timbal balik tersebut dalam organisasi penting sekali karena jika hanya satu arah saja dari pimpinan kepada bawahan, roda organisasi tidak akan berjalan dengan baik.

Pimpinan perlu mengetahui laporan, tanggapan atau saran anggota sehingga suatu keputusan atau kebijaksanaan dapat di ambil dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

2) Komunikasi Horizontal

Komunikasi horizontal adalah komunikasi secara mendatar, antara anggota staf dengan anggota staf, karyawan dengan karyawan dan sebagainya. Berbeda dengan komunikasi vertical yang sifatnya lebih formal, komunikasi horizontal sering kali berlangsung tidak formal. Mereka berkomunikasi satu sama lain bukan pada waktu mereka sedang bekerja, melainkan pada saat waktu-waktu luang.

Dalam situasi komunikasi seperti ini, desas-desus cepat sekali menyebar dan menjalar, dan yang menjadi pokok pembicaraan sering kali mengenai hal-hal yang menyangkut pekerjaan atau tindakan pimpinan yang merugikan mereka.

Antara komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal tersebut kadang-kadang terjadi apa yang disebut dengan komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal atau yang disebut juga dengan komunikasi silang (*cross communication*) adalah komunikasi pimpinan divisi dengan anggota lain.

b. Komunikasi Eksternal

Komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak diluar organisasi. Komunikasi eksternal terdiri atas dua jalur secara timbal balik yaitu komunikasi dari organisasi kepada khalayak dan komunikasi dari khalayak kepada organisasi.

1) Komunikasi dari Organisasi Kepada Khalayak

Komunikasi dari organisasi kepada khalayak pada umumnya bersifat informatif, yang di lakukan sedemikian rupa sehingga khalayak merasa memiliki keterlibatan. Kegiatan ini sangat penting dalam usaha memecahkan suatu masalah jika terjadi tanpa di duga.

2) Komunikasi dari Khalayak Kepada Organisasi

Komunikasi dari khalayak kepada organisasi merupakan umpan balik sebagai efek dari kegiatan komunikasi yang di lakukan oleh organisasi. Jika informasi yang di sebarkan kepada khalayak itu menimbulkan efek yang sifatnya kontroversial (menyebabkan adanya pro dan kontra di kalangan khalayak). Opini publik ini seringkali merugikan organisasi.⁴²

⁴² Opan Arifudin, Teori-teori Dalam Komunikasi Organisasi, H. 119-120

2. Teori Komunikasi Massa

Menurut Dennis McQuail (1987), jenis dan teori komunikasi massa adalah sebagai berikut:

a. Teori Ilmu Pengetahuan Sosial (*Social Scientific Theory*)

Teori ini berdasarkan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan sifat dasar, cara kerja, dan pengaruh komunikasi massa yang bersumber dari observasi sistematis yang sedapat mungkin diupayakan bersifat objektif. Sumber teori ini merupakan kenyataan tentang media. Dalam penerapannya jenis teori ini sering bergantung pada ilmu sosial lainnya.

b. Teori Normatif (*Normative Theory*)

Teori ini berkenaan dengan masalah bagaimana seharusnya media berperan ketika serangkaian nilai sosial ingin diterapkan dan dicapai sesuai dengan sifat dasar nilai-nilai sosial tersebut. Jenis teori ini begitu penting karena berperan dalam membentuk institusi media. Bahkan media berpengaruh besar dalam membatu apa yang diharapkan oleh publik media, organisasi, serta pelaksana organisasi sosial itu sendiri.⁴³

c. Teori Praktis (*Operational Theory*)

Pada awalnya teori ini dikembangkan oleh para praktisi media. Teori ini menyuguhkan penuntun tentang tujuan media, cara kerja yang seharusnya diharapkan agar seirama dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan sosial yang sifatnya lebih abstrak, serta cara-cara pencapaian

⁴³ Denis McQuail. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 1987), H. 77-78.

beberapa sasaran tertentu. Sebuah teori masuk dalam rumpun teori praktis karena bisa membantu menemukan jawaban masalah.

d. Teori Akal Sehat (*Commonsense Theory*)

Teori ini merupakan pengetahuan dan gagasan yang dimiliki oleh setiap orang dengan begitu saja atau melalui pengalaman langsung dengan masyarakat. Setiap pembaca surat kabar atau penonton televisi mempunyai teori sendiri mempunyai seperangkat gagasan tentang media tersebut.⁴⁴

e. Teori Masyarakat Massa

Teori ini menekankan ketergantungan timbal balik antar institusi yang memegang kekuasaan dan integrasi media terhadap sumber kekuasaan sosial dan otoritas. Dengan demikian isi media cenderung melayani kepentingan pemegang kekuasaan politik ekonomi. Namun demikian, meskipun media tidak bisa diharapkan menyuguhkan pandangan kritis atau tinjauan lain menyangkut masalah kehidupan, media tetap memiliki kecenderungan untuk membantu publik bebas dalam menerima keberadaannya sebagaimana adanya.⁴⁵

f. Teori Media Politik-Ekonomi

Teori media politik-ekonomi merupakan nama lama yang dihidupkan kembali untuk digunakan dalam menyebutkan sebuah pendekatan yang memusatkan perhatian lebih banyak pada struktur ekonomi daripada muatan (isi) ideologis media.

⁴⁴ Elvinaro Ardianto, Dkk. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2007), H. 62.

⁴⁵ Elvinaro Ardianto, Dkk. *Komunikasi Massa*...H. 72.

Teori ini mengemukakan ketergantungan ideologi pada kekuatan ekonomi dan mengarahkan perhatian penelitian pada analisis empiris terhadap struktur kepemilikan dan mekanisme kerja kekuatan pasar media. Menurut tinjauan ini, institusi media harus dinilai sebagai bagian dari sistem ekonomi yang juga bertalian erat dengan sistem politik.

g. Teori Hegemoni Media

Teori ini kurang memusatkan perhatian pada faktor ekonomi dan struktur ideologi itu sendiri, bentuk ekspresi, cara penerapan, dan mekanisme yang dijalankannya untuk mempertahankan dan mengembangkan diri melalui kepatuhan para korbannya terutama kelas pekerja, sehingga upaya itu berhasil mempengaruhi dan membentuk alam pikiran mereka. Perbedaan teori ini dengan pendekatan Marxis klasik dan pendekatan politik-ekonomi terletak pada pengakuannya terhadap lebih besarnya kadar ketidaktergantungannya pada kekuatan ekonomi. Ideologi sebagai salah satu definisi realitas yang kabur dan gambaran hubungan antarkelas, atau hubungan inajiner para individu dengan kondisi keberadaan mereka yang sebenarnya tidaklah dominan.

Sebagai mana pengertian bahwa ideologi itu dipaksakan oleh kelas penguasa, tetapi merupakan pengaruh budaya yang disebarkan secara adar dan dapat meresap, serta berperan dalam menginterpretasikan pengalaman tentang kenyataan.⁴⁶

⁴⁶ Elvinaro Ardianto, Dkk. Komunikasi Massa...H. 73

h. Teori Masyarakat Informasi

Pada dasarnya masyarakat informasi masyarakat pascaindustri adalah masyarakat yang menilai informasi sebagai sumber daya, sarana produksi, dan produk utama yang paling berharga. Oleh karena itu, mayoritas tenaga kerjanya adalah pekerja informasi. Di samping itu, berdasarkan beberapa indikasi lainnya informasi mengandung nilai ekonomi dan sosial yang dominan.

Kategori pekerjaan informasi memiliki lingkup yang sangat luas, termasuk semua orang yang pekerjaannya berkaitan dengan produksi, pengolahan dan distribusi informasi atau produksi teknologi informasi. Pada semua masyarakat maju semua bidang tersebut cenderung mengalami perkembangan yang sangat cepat. Walaupun peran media massa dalam kenaikan produksi informasi tersebut sulit dipastikan, namun menurut beberapa perkiraan perannya dapat dikatakan besar.

Media massa memang cukup banyak terlibat dalam proses perubahan tersebut, sehingga mendapat perhatian besar dalam teori tentang masyarakat informasi. Dapat dikatakan bahwa media massa semakin berkembang dan efisien dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi.

Dalam pengertian luas, media massa merupakan perangsang penting terhadap penilaian dan konsumsi informasi, media massa menunjang upaya produksi, perolehan teknologi komunikasi dan pengembangan teknologi baru media.⁴⁷

⁴⁷ Nuruddin. *Pengantar Komunikasi Massa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) H. 22.

i. Media Critical Theory

Teori ini berakar dari aliran ilmu-ilmu kritis yang bersumber pada ilmu sosial Marxis. Beberapa tokoh pelopornya antara lain; Karl Marx, Engels Guevera, Regis, Debay, T. Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas, Altrusser, Johan Galtung, Cardoso, Dos Santos, Paul Baran Samir Amin, Hamza Alavi pemikiran modern. Ilmu ini juga disebut dengan emancipatory science cabang ilmu sosial yang berjuang untuk mendobrak status quo dan membebaskan manusia, khususnya rakyat miskin dan kecil dari status quo dan struktur sistem yang menindas.

Beberapa teori studi budaya (*cultural studies*) dan ekonomi politik juga bisa dikaitkan dengan teori kritis. Sebab, teori-teori itu secara terbuka menekankan perlunya evaluasi dan kritik terhadap status quo. Teori kritis membangun pertanyaan dan menyediakan alternatif jalan untuk menginterpretasikan hukum sosial media massa.

Teori kritis sering menganalisis secara khusus lembaga sosial, penyelidikan luas untuk yang dinilai objektif adalah mencari dan mencapai. Media massa dan budaya massa telah mempromosikan banyak hal yang ikut menjadi sasaran teori kritis.

Bahkan ketika media massa tidak melihat sebagai sumber masalah khusus, mereka dikritik untuk memperburuk atau melindungi masalah dari yang diidentifikasi atau disebut dan dipecahkan. Bisa dikatakan bahwa teori media kritis ini sebisa mungkin mendorong perubahan secara terus-menerus.

Hegemoni pemilik modal sudah saarnya dihilangkan dengan perlawanan. Sebab, pemilik modal biasanya akan lebih mementingkan *safety first* bisnis media massanya. Artinya, jika kebijakan media mengancam kemarahan pemerintah yang akhirnya mengancam bisnis medianya harus dilawan. Teori media kritis merupakan alternatif baru dalam usaha memahami seluk-beluk media dan bagaimana media itu harus selalu bersikap untuk tidak mengukuhkan status quo. Menurut perspektif teori ini, media tidak boleh hanya memberitakan fakta atau kejadian yang justru memperkuat status quo.

Media harus terus mengkritisi setiap ketidakadilan yang ada di sekitarnya. Hal ini juga berarti, media tidak boleh tunduk pada pemilik modal yang kadang ikut menghegemoni isi medianya. Media harus terus mengkritisi dan melawan segala bentuk hegemoni dan kekuasaan yang hanya berada di tangan penguasa.⁴⁸

j. *Selective Processes Theory* (Teori Proses Selektif)

Teori ini merupakan hasil penelitian lanjutan tentang efek media masa pada Perang Dunia II yang mengatakan bahwa penerimaan selektif media massa mengurangi sejumlah dampak media. Teori ini menilai khalayak cenderung melakukan *selective exposure* (terpaan selektif). Mereka menolak pesan yang berbeda dengan kepercayaannya.

⁴⁸ Rohim, Syaiful. *Teori Komunikasi Perspektif, Ragam, dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009 H. 98.

Tahun 1960 Joseph Klapper menerbitkan kajian penelitian efek media massa yang tergabung dalam penelitian pasca perang tentang persuasi, pengaruh personal dan proses selektif. Klapper menyimpulkan bahwa pengaruh media itu lemah, presentase pengaruhnya kecil bagi pemilih dalam pemilihan umum, pasar saham, dan pengiklan.

k. *Social Learning Theory* (Teori Pembelajaran Sosial)

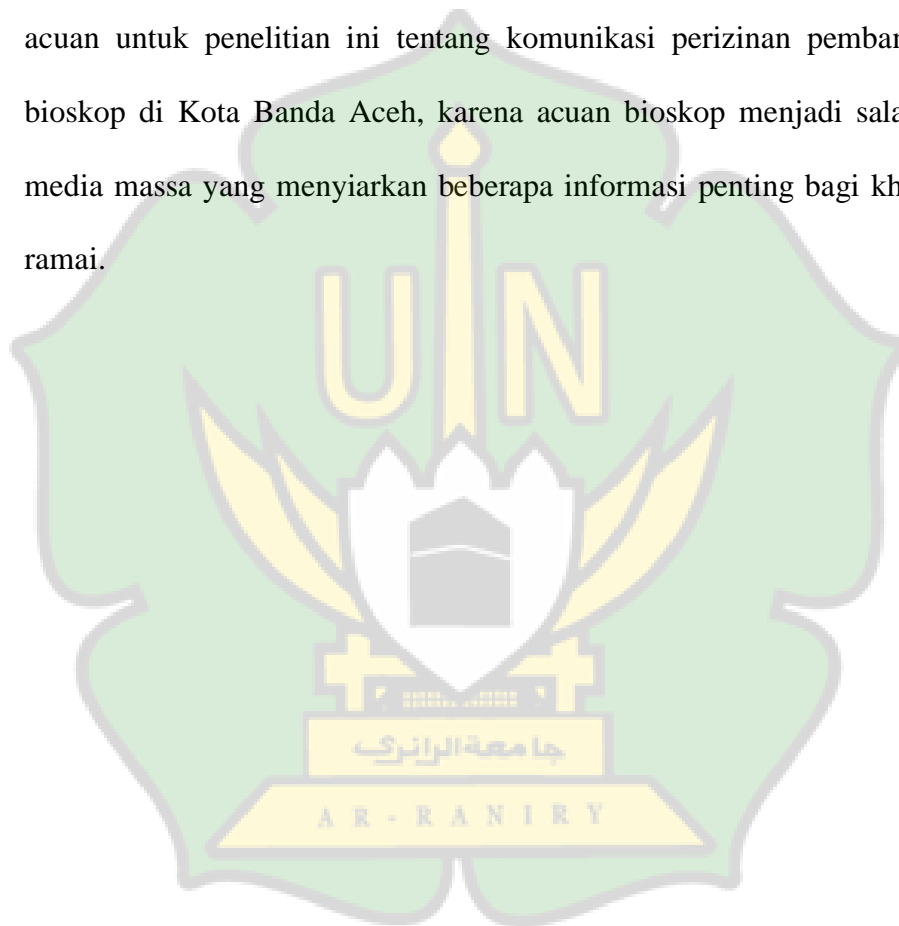
Selama beberapa tahun kesimpulan Klapper dirasakan kurang memuaskan. Penelitian dimulai lagi dengan memakai pendekatan yang baru, yang dapat menjelaskan pengaruh media yang tak dapat disangkal lagi, terutama televisi terhadap remaja. Maka muncullah teori baru yang bernama *Social Learning Theory* (Teori Pembelajaran Sosial).

Teori ini diaplikasikan pada perilaku konsumen yang bertujuan untuk memahami efek terpaan media massa. Berdasarkan hasil penelitian Albert Bandura, teori ini menjelaskan bahwa pemirsa meniru apa yang mereka lihat di televisi, melalui suatu proses *observational learning* (pembelajaran hasil pengamatan).

Klapper menganggap bahwa ganjaran dari karakter TV diterima sebagai perilaku antisosial, termasuk menjadi toleran terhadap perilaku perampokan dan kriminalitas, menggandrungi kehidupan glamor seperti di televisi.⁴⁹

⁴⁹ Rohim, Syaiful. *Teori Komunikasi Perspektif, Ragam, dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009. H. 99.

Dari penjelasan beberapa teori diatas tentang komunikasi organisasi dan komunikasi massa maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini banyak kaitanya dengan komunikasi organisasi karena meliputi beberapa tugas pokok dan fungsi pemerintah terkait dalam mengeluarkan suatu kebijakan. Sedangkan teori komunikasi massa menjadi acuan untuk penelitian ini tentang komunikasi perizinan pembangunan bioskop di Kota Banda Aceh, karena acuan bioskop menjadi salah satu media massa yang menyiarkan beberapa informasi penting bagi khalayak ramai.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengertian Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu.⁵⁰ *Logos* berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian penyelidikan.⁵¹

Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.⁵²

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan. Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggung jawabkan, yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah.

⁵⁰Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramdia, 1985), H.7.

⁵¹ John M.Echol dan Hassan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1985), H. 480.

⁵²Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), H. 910.

Dengan demikian disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara kerja ilmiah untuk menggali suatu masalah dengan pemeriksaan teliti untuk pengumpulan, pengolahan, analisis data secara sistematis dan objektif dan menemukan kesimpulan sehingga memperoleh informasi yang berguna bagi manusia.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menggunakan kata-kata dalam menjelaskan temuan penelitian dan menganalisisnya. Penelitian kualitatif sangat cocok digunakan untuk memahami fenomena sosial, masalah atau gejala dalam manusia dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mendalam, data disajikan dalam bentuk verbal, bukan dalam bentuk angka.

Alasannya karena dalam pengumpulan data pada penelitian ini terjadi interaksi antara peneliti dengan sumber data. Di samping itu metode kualitatif paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh di lapangan.

Pendekatan kualitatif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Walaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip, dokumen wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan lain-lain.⁵³

⁵³Sudarwan Darnim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2022), H. 51.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini dapat dilakukan di pemerintahan Kota Banda Aceh dan komunitas film yang ada di Banda Aceh.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk terlaksana penelitian dengan baik, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung melalui alat indra seperti penglihatan, penciuman, pendengaran dan lainnya. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan cara melihat langsung di lingkungan masyarakat terkait. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mencari data tambahan dari informan mengenai rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan informasi tanya jawab baik secara langsung maupun tak langsung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara terpimpin dengan pertanyaan terperinci, serius tetapi dilakukan dengan santai. Wawancara ini dimaksudkan sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan cara percakapan langsung antara peneliti dengan narasumber.

Selain itu, ada beberapa tokoh public dan sejarawan yang di wawancara sebagai infoman didalam penelitian ini, yaitu, Bapak Nab Bhany As, Bapak Fauzan Santa, Bapak Azhari Aiyub, Bapak Davi Abdullah.

Wawancara dilakukan di beberapa dinas antara lain :

- a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banda Aceh (DPM-PTSP Kota Banda Aceh),
- b. Dinas Badan Pelestarian Nilai Budaya Aceh (BPNB Aceh),
- c. Humas Kota Banda Aceh,
- d. Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan khusus yang berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali serta penyebaran dokumen. Dalam hal ini, studi dokumentasinya adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

E. Teknik Analisi Data

1. Reduksi Data

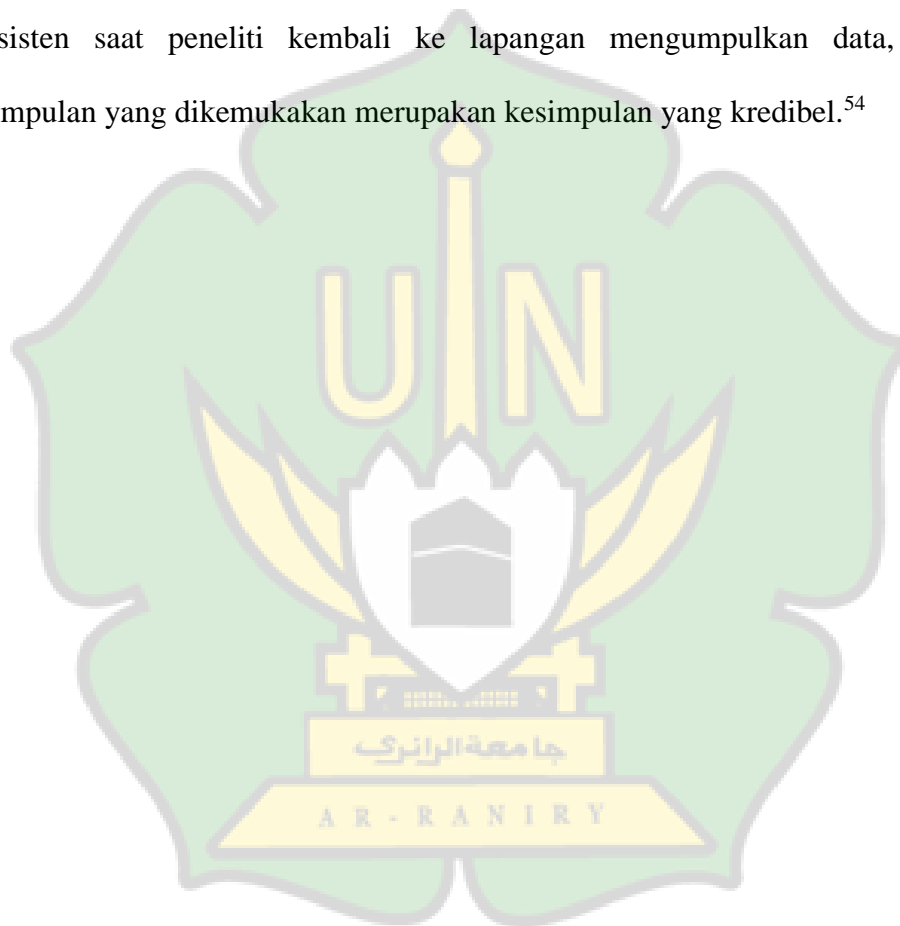
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

F. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁴



BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Pemerintahan Kota Banda Aceh

1. Sejarah Kota Banda Aceh

Banda Aceh dikenal sebagai tua yang erat kaitannya dengan sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Di masa kesultanan, Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Saat ini, Banda Aceh telah berusia 813 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam Tertua di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh juga memerankan peranan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara/ Indonesia. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekkah.

Dimasa jayanya, Bandar Aceh Darussalam dikenal sebagai Kota regional utama yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Oleh karena itu, kota ini dikunjungi oleh banyak pelajar dari Timur Tengah, India dan Negara lainnya. Bandar Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk dari Arab, Turki, China, Eropa, dan India. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh. Hal ini menyebabkan adanya pembauran budaya.⁵⁵

⁵⁵ Sekilas Sejarah Bandar Aceh Darussalam, <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html> diakses 15 Juni 2022. Diakses Pada Tanggal 19 Juni 2022.

Hingga saat ini, budaya-budaya masih menyisakan pemandangan disudut-sudut Kota Banda Aceh. Misalnya di Budaya Pecinan di Gampong Peunayong dan peninggalan kuburan Turki di Gampong Bitai. Dengan demikian Kota Banda Aceh secara astronomis terletak antara $05^{\circ}16'15''$ - $05^{\circ}36'16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ}16'15''$ - $95^{\circ}22'35''$ Bujur Timur dan memiliki luas wilayah 61,36 km². Kota Banda Aceh memiliki batasan wilayah yang meliputi, sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Besar.

Kota Banda Aceh merupakan dataran rawan banjir dari luapan Sungai Krueng Aceh dan 70% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 10 meter dari permukaan laut. Ke arah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang dengan ketinggian hingga 50 m di atas permukaan laut. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah Barat dan Timur dengan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut. Daerah pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar dibagi menjadi:

- a. Dataran terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian Kecamatan Kuta Raja
- b. Pesisir pantai wilayah barat di sebagian Kecamatan Meuraxa

Kondisi tanah yang umumnya terdapat di Kota Banda Aceh secara umum dan khususnya di daerah pesisir ini didominasi oleh jenis tanah Podzolik Merah Kuning (PMK) dan Regosol dengan tekstur tanah antara sedang sampai kasar.⁵⁶ Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh yaitu 4.154 jiwa/km². Angka pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh cukup fluktuatif pada rentang waktu tahun 2006-2015 dengan rata-rata 2,67% per tahun. Konsentrasi kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kuta Alam dengan jumlah penduduk sebanyak 50.618 jiwa atau 15% dari jumlah penduduk Kota Banda Aceh.

Dalam RPJMN 2015-2019, Kota Banda Aceh diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai pusat koleksi dan distribusi skala regional untuk produksi pertanian, pariwisata, dan perikanan laut. Kota Banda Aceh juga termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional KAPET Banda Aceh Darussalam. Potensi wisata yang terdapat di Kota Banda Aceh terdiri dari potensi wisata alam, wisata jejak historis bencana tsunami, wisata spiritual, serta wisata sejarah dan jejak purbakala.

a. Visi Misi Kota Banda Aceh

1) Visi

Terwujudnya kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah.

2). Misi

a) Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan

Aqidah, Akhlak, Ibadah, Muammalah dan Syiar Islam.

⁵⁶ Profil Kota Banda Aceh, <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/58>, diakses 15 Juni 2022

- b) Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
- c) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kesejahteraan masyarakat.
- d) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- e) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
- f) Membangun infrastruktur Kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- g) Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.⁵⁷

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banda Aceh (DPM-PTSP Kota Banda Aceh)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dibentuk dengan Peraturan Walikota Nomor 378 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Kemudian dikuatkan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Qanun Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan.

⁵⁷ Sekilas Sejarah Bandar Aceh Darussalam, <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html> diakses 15 juni 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk melaksanakan tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor.
- b. Pelaksanaan penyusunan program kerja kantor.
- c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan.
- d. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan.
- e. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- f. Pemantauan dan evaluasi proses pemeberian pelayanan perizinan dan non perizinan.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di budang pelayanan perizinan dan non perizinan.
- h. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan:

- a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.

- b. Melakukan penelitian dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.
- c. Melakukan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- d. Menyelenggarakan pelayanan informasi dan pengaduan.
- e. Menerima retribusi perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Menerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian kewenangan.
- g. Menyiapkan bahan pembinaan, evaluasi, pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan.⁵⁸

3. Badan Pelestarian Nilai Budaya Aceh (BPNB Aceh)

Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh (BPNB Aceh) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan pelestarian aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan yang meliputi dua provinsi sekaligus, yakni Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

Tugas pokok dan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh adalah:

- a. Pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;

⁵⁸ Profil DPM-PTSP Kota Banda Aceh, <https://dpmptsp.bandaacehkota.go.id/profile#>, diakses 26 Juni 2022

- b. Pelaksanaan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- c. Pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- e. Pelaksanaan kemitraan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.⁵⁹

4. Humas Kota Banda Aceh

Hubungan masyarakat (HUMAS) termasuk ke dalam komponen yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Sebab, humas adalah wajah dari suatu perusahaan atau organisasi. Peran utama seorang humas adalah membangun citra positif tempatnya bernaung di mata publik.

⁵⁹ Profil dan Tupoksi Dinas BPNB Aceh-Sumut, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id> /,diakses 26 Juni 2022

Maka dari itu, seorang humas wajib untuk memahami secara detail seluk-belum dan segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasinya. Mengutip buku Humas & Keprotokolan, praktik Humas adalah proses pemikiran, perencanaan, dan pencurahan daya untuk membangun serta menjaga pengertian antara organisasi dengan publiknya. Apabila terjadi masalah di suatu organisasi, maka humas harus segera memberikan pernyataan kepada publik agar citra perusahaan tetap terjaga. Palsunya, kesuksesan suatu organisasi atau perusahaan dalam membangun reputasi yang positif ada di tangan seorang humas.

Humas menjadi pengelola komunikasi antara sebuah organisasi dengan publik. Karenanya, seorang humas sebaiknya mengetahui tugas lengkapnya agar dapat menjaga citra organisasi dengan baik. Berikut tugas Humas yang dikutip dari buku Manajemen Humas dan Publik Opinion Building karangan Slamet Mulyadi.

- a. Mengedukasi publik melalui kegiatan non profit untuk menggunakan barang atau jasa instansinya.
- b. Mengadakan klarifikasi atau usaha untuk mengatasi salah paham antara instansi dengan publiknya.
- c. Meningkatkan penjualan barang atau jasa.
- d. Meningkatkan kegiatan yang dekat atau berkaitan dengan kegiatan masyarakat.
- e. Mengedukasi dan meningkatkan tuntutan serta kebutuhan masyarakat terhadap barang atau jasa yang dihasilkan.

- f. Mencegah pergeseran penggunaan barang atau jasa yang sejenis dari pesaing.⁶⁰

5. Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Memfaatkan kehidupan untuk berkhidmat secara Islam merupakan sebuah upaya bersama yang harus dilaksanakan untuk terwujudnya aktualisasi risalah Islam secara kaffah sebagai sistem hidup universal, yaitu membangun dan mewujudkan masyarakat yang paham akan kebijakan, enggan melakukan kemungkaran. Wadah ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 terwujudnya dalam bentuk Dinas Syariat Islam.

Pembentukan Dinas Syariat Islam (DSI) sebagai perangkat daerah, merupakan respon konkrit untuk menyahuri pemberlakuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam. Tahun pertama dari kelahiran Dinas Syariat Islam ini telah dilalui dengan pengalaman suka dan duka.

Terlalu banyak hasrat dan permintaan masyarakat yang tidak dapat terpenuhi karena kendala sumber daya sebagaimana dikedepankan terdahulu, sangat mustahil mewujudkan suatu gagasan yang demikian besar malah dalam ukuran raksasa diterobos dengan berpacu lewat waktu terbatas tanpa dukungan sarana prasarana.

⁶⁰ Tugas Humas dan Peranannya dalam Sebuah Organisasi, <https://kumparan.com>, diakses 05 juli 2022

Dinas Syariat Islam telah lahir dengan modal nilai kebersamaan, transparansi dan profesionalisme, dia akan melangkah walaupun lambat tetapi pasti.

a. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

1) Kedudukan

Pertama, Dinas Syariat Islam Adalah Perangkat daerah sebagai unsure Pelaksanaan Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang berada dibawah Gubernur. *Kedua*, Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2) Tugas

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Daerah dan Pembangunan serta bertanggung jawab dibidang Pelaksanaan Syariat Islam.

3) Fungsi

Pertama, Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan qanun yang berhubungan dengan Pelaksanaan Syariat Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya. *Kedua*, Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan Pelaksanaan Syariat Islam. *Ketiga*, Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancara dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta menyemarakkan syiar Islam.

Keempat, Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Syariat Islam ditenga-tengah masyarakat. Dan *Kelima*, Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembimbingan dan penyuluhan Syariat Islam.

4) Kewenangan

Pertama, Merencanakan program, penelitian dan pembangunan unsur-unsur Syariat Islam. *Kedua*, Melestarikan nilai-nilai Islam. *Ketiga*, Mengembangkan dan membimbing Pelaksanaan Syariat Islam yang meliputi bidang-bidang Aqidah, Ibadah, Mu'amalat, Akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiah, *amarmakruf nahimungkar*, baitalmal, kemasyarakatan, Syiar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat dan mawaris. *Keempat*, mengawas terhadap pelaksanaan Syariat Islam, dan *Kelima*, membina dan mengawasi terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Dinas Syariat Islam dengan posisi perangkat daerah merupakan unsur pelaksana Syariat Islam dilingkungan Pemerintah Daerah berada dibawah Gubernur mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintah daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab dibidang pelaksanaan Syariat Islam.⁶¹

⁶¹ Profil dan Tugas Dinas Syariat Kota Banda Aceh, <https://Dinassyariatislam.com>, diakses 05 juli 2022

B. Faktor Penyebab Gedung Bioskop Di Aceh Tidak Terealisasi Sampai

Saat ini

1. Framing Masyarakat yang Kontra Terhadap Gedung Bioskop

Tidak semua masyarakat senang dan gembira ketika bioskop terus beroperasi di Kota Banda Aceh, ada juga masyarakat yang tidak senang dengan hadirnya bioskop-bioskop di Kota Banda Aceh, pertama kali bioskop masuk ke Kota Banda Aceh hampir semua masyarakat menyukai dan memberi respek positif terhadap adanya bioskop di Kota Banda Aceh dan adapula yang tidak memperdulikannya.

Semakin berkembangnya zaman, bioskop semakin bertambah di Kota Banda Aceh dan mulalah terjadi pro dan kontra masyarakat terhadap bioskop-bioskop yang ada di Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat menilai bioskop dijadikan sebagai tempat melakukan maksiat bagi mudi-mudi.

Maka hal inilah penyebab kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap kehadiran bioskop di Kota Banda Aceh kekhawatiran masyarakat sangat beralasan karena dilihat dari suasana didalam ruangan bioskop yang gelap dan bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Kehadiran film dewasa juga menjadi hal yang sangat ditentang oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai komunikasi pembangunan bioskop di Kota Banda Aceh, ada beberapa kendala sehingga tidak terealisasi nya bioskop di Kota Banda Aceh. Seperti yang telah penulis sebutkan pada bab satu yang disebabkan oleh tidak adanya kejelasan dari pihak

berwenang terkait pembangun bioskop di Kota Banda Aceh seperti melempar bola, antara pihak yang berkepentingan dengan regulasi yang belum jelas.

Bapak Iswanda, S.Ag sebagai kabid dakwah dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menjelaskan bahwasanya freming masyarakat terhadap penerapan hukum Syariat dan qanun Aceh, membuat banyak orang mengklaim bahwa Aceh ini Kota yang penuh dengan peraturan dan banyak orang luar Kota Banda Aceh menjadikan Aceh sebagai kota Syariat dan ajaran Islam nya yang kuat.

“Aceh hari ini adalah kota madia yang penerapan Syariat yang kental, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa Aceh menjadi Kota yang begitu patuh dengan Syariat, contoh kecilnya saja seperti halnya Masyarakat luar Ketika mendengar nama Aceh pasti terlintas kepada mereka hukum cambuk yang nyatanya hukum cambuk hanya dijatuhkan kepada orang yang melanggar peraturan qanun yang sudah ditetapkan. Begitu pula dengan pembangunan bioskop yang dianggap orang bertentangan dengan Syariat yang berlaku di Aceh hari ini.”⁶²

Dari hasil wawancara diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa freming yang beredar pada masyarakat hari ini baik itu masyarakat luar baik juga dari masyarakat Kota Banda Aceh bahwa Syariat Islam itu satu hal ketakutan bagi mereka sehingga membuat beberapa pihak terutama investor atau pengusaha film engan membangun gedung bioskop di Kota Banda Aceh karena masih tidak jelasnya regulasi dan jaminan untuk pembangunan gedung bioskop tersebut.

⁶² Hasil Wawancara Dengan Iswanda, S.Ag sebagai kabid dakwah dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Pada Hari Jumat Tanggal 04 Juli 2022.

2. Penetapan Syariat Islam di Aceh

Untuk menyelesaikan masalah Aceh, pemerintah memberi hak kepada masyarakat Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam dalam kehidupan mereka pemberian hak melaksanakan syariat Islam ini, secara yuridis merupakan perwujudan UU-RI No.44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ke istimewa dan otonomi khusus Aceh yang meliputi 4 bagian utama: *Pertama*, penyelenggaraan kehidupan beragama. *Kedua*, penyelenggaraan kehidupan adat. *Ketiga*, penyelenggaraan pendidikan, dan *Keempat*, peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Dalam konteks ini Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengesahkan dua Qanun yang menjadi landasan operasional Syariat Islam di Aceh yaitu Qanun No.10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam dan Qanun No.11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah, dan Syiar Islam. Namun bagi masyarakat Aceh Undang-undang dan Qanun tersebut bukanlah hal baru, tetapi secara historis syariat Islam di bumi Aceh sudah dilaksanakan dalam kehidupan nyata sejak beberapa abad yang lalu ketika Aceh masih berbentuk kerajaan.

Seperti yang dikatakan oleh sejarawan dan budayawan Aceh Bapak Nab Bhany As bahwa bioskop di Aceh dari tahun 2004 sampai saat ini belum menemukan titik terang terkait akan dibangunnya kembali bioskop di Kota Banda Aceh. Hal ini juga menyebabkan banyak anak muda dan masyarakat Kota Banda Aceh sendiri tidak pernah lagi merasakan bagaimana nikmat menonton film di bioskop.

Adanya bioskop akan menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menunjang wisatawan asing datang ke Kota Banda Aceh baik itu menikmati wisata halal atau hanya sekedar menonton bioskop. Terdapat beberapa kendala yang sehingga bioskop sampai saat ini tidak terealisasikan di Kota Banda Aceh.

“Memuncaknya konflik di Aceh dan pada tahun 2002 sudah keluarnya UUD kekhususan Aceh terkait pelaksanaan Syariat Islam, yang padahal tidak ada larangan untuk hiburan. Walaupun nanti ada pengusaha-pengusaha yang ingin mendirikan bioskop di Aceh tidak berani, mungkin karena ada sangkut pautnya dengan penetapan Syariat Islam. Dengan demikian, menjadi kendala kita di Aceh hari ini dan masyarakat sudah menganggap semacam pelarangan walaupun tidak ada larangan yang jelas. Persoalan hari ini kerana kita sudah di ikat dengan pelaksanaan Syariat Islam, hal ini membuat pengusaha film engan membangun bioskop di Aceh karena ketakutan menentang Syariat Islam, dan pun jamin dan keaman tidak jelas ketika nanti bioskop di didirikan di Aceh, pengusaha tentu tidak ingin mengambil resiko”⁶³

Hal ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh seorang praktisi senior film Aceh dan salah satu Dosen di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Bapak Fauzan Santa menjelaskan terkait tidak terealisasinya bioskop di Aceh itu disebabkan oleh tidak adanya dorongan dari pihak berwenang dan peraturan yang jelas dari pemerintah terkait di perbolehkannya bioskop di Kota Banda Aceh atau tidak di perbolehkannya pembangunan bioskop di Kota Banda Aceh, dengan demikian bioskop sudah menjadi cerita lama untuk anak muda hari ini yang tidak menemukan lagi bioskop di Kota Banda Aceh.

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Nab Bhany As, selaku Sejarawan dan Budayawan Aceh pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022.

Tidak ada bioskop juga akan menimbulkan perilaku kejahatan bagi beberapa orang yang mencoba mencuri data atau link film yang tidak resmi di situs web yang tidak bertanggung jawab, hal ini menjadi salah satu keresahan bagi setiap pembuat film komersil yang menyiarkan filmnya di bioskop.

“Bioskop pernah diusulkan akan dibangun di Kota Banda Aceh yaitu di samping hotel Hermes Gampong Lampineng Kota Banda Aceh, wacana nya macet karena tidak ada kesimpulan ditingkat Muspida dan pihak terkait. Dan bioskop dianggap tidak penting, dan tidak berhubungan dengan Syariat Islam yang ada di Aceh. Hal ini mengorbankan banyak sisi anak muda yang suka menonton bioskop, tidak ada kepastian antara pihak berwenang dan pengusaha yang tidak siap menerima kritikan dari pihak-pihak tertentu dengan adanya bioskop di Aceh ini. Sejalan dengan ini kemungkinan pihak Kominfo dan Dinas Pariwisata mengharapkan adanya bioskop di Kota Banda Aceh.”⁶⁴

3. Berkembangnya Teknologi Informasi

a. Televisi

Nilai pemerintah yang representatif dan partisipasi warga masyarakat akan diabaikan. Kelompok tertentu dapat memperoleh pengaruh yang tidak proporsional dengan menggunakan komputer untuk memasang nama dan ciri orang sebagai sasaran atau himbuan politis langsung melalui *direct mail*. Atau melalui “sistem interaktif”, misalnya melalui telepom dua arah atau TV kabel untuk mengadakan poll opini publik dapat mengarah kepada pertimbangan yang tidak baik dalam mengambil keputusan.⁶⁵

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Fauzan Santa, Selaku Praktisi Senior Film Aceh Pada Hari Jumat Tanggal 20 Mei 2022.

⁶⁵ Salman Yoga S, “Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi”, Jurnal Al-Bayan Vol. 24 No. 1 Januari – Juni 2018, 29 – 46

Televisi sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat karena hingga saat ini masyarakat menggunakan televisi untuk memperoleh informasi. Televisi masih menjadi favorit karena harganya terjangkau, tidak hanya dimiliki oleh kalangan menengah keatas saja tetapi orang-orang dari kalangan bawah juga bisa memilikinya dan menikmati acara yang sama. Perkembangan TV sempat terhenti karena terjadinya perang dunia ke-2.

Selama berlangsungnya perang teknologi-teknologi baru telah disempurnakan sehingga kemajuan TV berkembang pesat. Awalnya, semua program ditayangkan dalam siaran langsung sehingga para pengisi acara harus mengulangnya agar bisa disiarkan lagi di lain kesempatan.

Tahun 1956, dikembangkanlah *videotape* Ampex Corporation sehingga siaran dari program tersebut bisa disimpan dan para pengisi acara tidak perlu mengulangnya beberapa kali. Pada tahun 1960-an, TV berwarna pun mulai muncul dan masih digunakan publik hingga saat ini. TVRI dikenal sebagai siaran pertama milik pemerintah di Indonesia sebelum munculnya siaran lain seperti RCTI, disusul SCTV, Indosiar, TPI, dan ANTV.

Pada tahun 2000, munculah 5 stasiun swasta lainnya yaitu Metro, Global, Trans, TV7 dan Lativi. Televisi berperan penting dalam kehidupan manusia khususnya dalam penyampaian komunikasi dimana teks, gambar, dan suara yang dihasilkan bisa mempermudah publik dalam memahami berita.

Sementara itu, dilihat dari potensi televisi sebagai pesaing bioskop bisa dikatakan bahwa dengan maraknya pertelevisian nasional, maka perhatian masyarakat pun tertuju pada layar kaca yang dimiliki oleh hampir seluruh rumah tangga di Indonesia. Hanya bermodalkan sebuah pesawat televisi yang tidak tergantung pada merk, ukuran, ataupun barang baru bekas penonton bisa menyaksikan berbagai stasiun televisi yang ada tanpa dipungut biaya lagi.

Program yang dihidangkan juga bervariasi dari berita, sulap, sinetron, komedi, wayang, mimbar agama, olahraga, kuis, hingga film layar lebar. Menurut Jashari dalam Kurnia kehadiran televisi swasta langsung membawa dampak yang cukup hebat terhadap penurunan omzet hingga 50% baik bagi pemilik bioskop, produser film hingga pengusaha rental video. Dampak ini tidak saja berkaitan dengan penayangan berbagai film layar lebar melalui televisi melainkan juga terpenuhinya hasrat mencari hiburan dengan menonton televisi yang murah dan meriah serta praktis karena bisa dilakukan di rumah masing-masing.⁶⁶

Kehadiran televisi sendiri sangat berpengaruh terhadap tutupnya bioskop-bioskop khususnya bioskop di Kota Banda Aceh. Televisi mulai ada di Kota Banda Aceh sekitar tahun 1970-an, dan siaran televisi dimulai pada tahun 1973.

⁶⁶Kurnia Novi, *Menguak Peta Perfilman Indonesia*, (Jakarta: Langit Aksara Yogyakarta, 2004), H. 113.

Sekitar tahun 1990-an barulah televisi menjadi primadona di kalangan masyarakat. Karena acara yang disiarkan mulai bervariasi dan harga televisi juga sudah terjangkau. Pesatnya kemajuan televisi memberikan efek yang tidak baik bagi bioskop, masyarakat lebih memilih menonton film di rumahnya sendiri dibandingkan harus membeli tiket untuk menonton film di bioskop. Karena hal tersebut, pengusaha-pengusaha bioskop mengalami kerugian dan banyak bioskop yang terpaksa ditutup.⁶⁷

b. Faktor Beredarnya Video VCD, Smartphone

Perkembangan industri perfilman Indonesia memang unik. Bangkitnya film Nasional yang ditandai banyaknya jumlah produksi film lokal dan peningkatan penjualan karcis bioskop. Disisi lain masalah besar yang terjadi adalah pelanggaran hak cipta film, khususnya pembajakan. Akibat dari maraknya penjualan VCD mengakibatkan kerugian bagi pengusaha bioskop dikarenakan sepi penonton yang datang. Bagi pedagang kaki lima, menjual VCD bajakan merupakan satu-satunya usaha yang dianggap mampu menyambung hidup sehari-hari dan hal ini menyebabkan ruginya pengusaha-pengusaha bioskop. Masyarakat memilih membeli VCD bajakan karena harganya lebih murah dan sangat mudah di dapatkan. Biasanya VCD yang dijual merupakan film yang sudah diputar sebulan yang lalu di bioskop.⁶⁸

⁶⁷Rizal Saivana, Sejarah Perkembangan Bioskop..., H. 50-51.

⁶⁸Rizal Saivana, Sejarah Perkembangan Bioskop..., H. 52.

4. Kurangnya Investor di Aceh

Tahun 1950-an yang dianggap sebagai kebangkitan perbioskopian di Indonesia menyebabkan banyaknya pengusaha-pengusaha terutama pengusaha China melirik usaha di bidang bioskop. Karena pada saat itu kebangkitan industri bioskop hampir tidak terpengaruh oleh situasi politik nasional yang berubah-ubah dan investasi bioskop atau di bidang bangunan dianggap menguntungkan. Pada tahun 1955 terbentuklah Persatuan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (PPBSI) yang bertujuan untuk melancarkan distribusi film-film yang masuk ke bioskop-bioskop.

Di Kota Banda Aceh sendiri usaha di bidang bioskop tidak hanya digeluti oleh pengusaha China tetapi juga ada pengusaha India dan pengusaha Aceh yang membangun bioskop di kota Banda Aceh. Salah satu keluarga yang merintis usaha dibidang bioskop adalah keluarga Harun Geachik Leumik. Menurut Harun pada saat itu pengusaha bioskop memperoleh keuntungan yang sangat besar karena masyarakat berbondong-bondong datang untuk menonton film dibioskop dan bioskop menjadi satu-satunya tempat hiburan bagi masyarakat Aceh pada saat itu.⁶⁹

Investor merupakan salah satu hal yang penting dalam pembangunan sarana hiburan seperti bioskop di Kota Banda Aceh, dalam beberapa tahun terakhir kurang nya investor sangat berpengaruh terhadap pembangunan gedung bioskop di Kota Banda Aceh.

⁶⁹ Rizal Saivana, Sejarah Perkembangan...2016

Sementara itu hal sama juga disampaikan oleh Bapak Azhari Ayub selaku penulis sekaligus sastrawan Aceh dan penggerak Komunitas Tikar Pandan. Aceh tanpa bioskop bukan hal yang aneh dan baru dikalangan masyarakat, bioskop di ibaratkan sebagai peninggalan sejarah yang pernah berjaya di Kota Banda Aceh, dengan demikian sampai hari tidak ada isu-isu yang pasti terkait pembangunan bioskop di Kota Banda Aceh.

“Bencana menyebabkan usaha bioskop hancur dan tidak dengan izin berdirinya bioskop, artinya pengusaha bioskop dulu pasti masih ada izin nya, karena izin tidak akan hancur karena bencana. Dengan demikian kita tidak ada bukti kuat ketika seseorang membangun bioskop di Banda Aceh mendapatkan larangan dari pihak pemerintah dan masyarakat sendiri. Banda Aceh sendiri tidak ada larangan untuk membangun bioskop, penyebab nya sekarang adalah resiko bisnis yang di hadapkan kepada investor yang ingin membangun bioskop di Kota Banda Aceh, yang kemungkinan besar akan dihadapkan dengan satu kelompok masyarakat yang tidak meginginkan bioskop di Aceh.”⁷⁰

Sementara itu menurut Bapak Davi Mansuri atau lebih dikenal dengan Davi Abdullah salah seorang Praktisi Film Aceh dan juga pemenang piala citra festival film indonesai tahun 2021. Beliau menyebutkan bioskop sebagai wadah yang bermanfaat bagi anak muda pegiat film yang akan memudahkan anak muda mencari referensi film yang bagus untuk dipelajari dan di aplikasikan ke pembuatan film di ranah Aceh sendiri. Adanya bioskop akan menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menunjang wisatawan asing datang ke Kota Banda Aceh.

“Masyarakat Aceh khusus nya Kota Banda Aceh udah seharusnya memiliki bioskop, seperti Kota kecil lainnya yang sudah memiliki bioskop contoh nya Kota Bengkulu dan Padang yang dulu tidak ada bioskop seiring dengan berjalan nya waktu dan kebutuhan minat menonton meningkat maka bioskop tersbeut didirikan, begitu juga dengan Kota Banda Aceh yang sekarang

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Azhari Ayub, Selaku Penulis Dan Sastrawan Aceh, Pada Hari Rabu Tanggal 8 Juni 2022.

sudah banyak minat untuk menonton sehingga Masyarakat Aceh sendiri harus menonton bioskop ke Kota terdekat yaitu Kota Medan. Seharusnya pemerintah dan pihak terkait dengan ini harus lebih jeli dalam membuat peraturan khusus terkait jika diizinkan nya pembangunan bioskop di Kota Banda Aceh, agar nantinya investor bisa tertarik membangun bioskop di Kota Banda Aceh”⁷¹.

C. Komunikasi Pemerintah Terkait Pembangunan Bioskop Di Kota Banda

Aceh

1. Komunikasi Pemkot Banda Aceh Terkait Pembangunan Bioskop

Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri beberapa waktu lalu menyatakan akan mempertimbangkan kemungkinan pembukaan kembali bioskop di Aceh. Untuk mempelajari regulasi bioskop di Negara lain, pemkot Banda Aceh menyampaikan akan melakukan studi banding ke Arab Saudi atau negara Islam lainnya.

Gagasan ini tentu sangat disayangkan, pemerintah terlihat telah menelan opini yang digiring oleh media. Fakta bahwa aktivitas menonton bioskop adalah budaya yang tidak Islami. Meski hukum asal menonton itu sendiri adalah mubah. Namun menyia-nyiakan waktu, menghamburkan uang, belum lagi bahaya dari konten tontonan itu sendiri adalah aktivitas yang cenderung kepada kemudharatan.

Demi mendukung kapitalisme global, bioskop memiliki berbagai jaringan dari level rendah hingga tinggi. Di Indonesia jaringan bioskop dipelopori oleh Cinema 21 yang hingga saat ini memiliki 4 produk dengan branding berbeda yakni Cinema 21, Cinema XXI, The Premiere dan IMAX.

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Davi Abdullah, Selaku Praktisi Film Aceh, Pada Hari Sabtu Tanggal 25 Juni 2022.

Kehadiran berbagai jaringan bioskop tersebut menggambarkan budaya konsumerisme yang berkembang pesat. Masyarakat Kota baik secara langsung maupun tak langsung ikut berperan membangun budaya ini dengan memahami bahwa budaya menonton bioskop adalah bagian dari *lifestyle* modern di era globalisasi.⁷²

Dalam hal ini Bapak Azwar, Humas Kota Banda Aceh menjelaskan juga kurangnya media promosi terkait hasil karya film dan karya visual yang diproduksi oleh komunitas-komunitas film di Kota Banda Aceh, wacana ini juga menjadi tugas Humas Kota Banda Aceh untuk membuat satu media hiburan yang bisa dikembangkan di Kota Banda Aceh salah satunya gedung bioskop. Agar sektor hiburan di Kota Banda Aceh semakin banyak.

*“Untuk saat ini media hiburan semacam bioskop sudah lama tidak dirasakan lagi oleh masyarakat Kota Banda Aceh setelah penutupan bioskop Garuda pada tahun 2004 di Peunayong, hal ini juga membuat banyak komunitas film tidak ada wadah untuk mencari hiburan ataupun referensi terkait film yang akan diproduksi. Peran Humas Kota Banda Aceh juga sampai hari ini selalu memberikan wadah kepada para komunitas film ini untuk membuat satu pertunjukan film baik itu ditempat terbuka maupun diruangan tertutup”.*⁷³

Dari hasil wawancara bersama Bapak Azwar, penulis menyimpulkan bahwa kerinduan para Masyarakat Kota Banda Aceh hari ini terhadap bioskop di Kota Banda Aceh masih banyak, walaupun sekarang sudah banyak media alternatif untuk menonton suatu film yang ingin dinonton. Bioskop bukan lagi sebagai media hiburan tetapi untuk saat ini bioskop juga menjadi media terbaik bagi pemuda atau komunitas film untuk terus berkarya.

⁷² Dikutip dari [Kapitalisme Global dan Upaya Reborn Bioskop Aceh - Pojok Opini](#) diakses pada 23 Juli 2022

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Azwar Bagian Komunikasi Pimpinan Humas Kota Banda Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022.

Sejalan dengan poin permasalahan tentang wacana juga tidak terlepas dari kurangnya tempat hiburan visual di Aceh terutama di Kota Banda. Bapak Azwar Humas Wali Kota Banda Aceh menyatakan terkait tidak terealisasikan bioskop di Kota Banda Aceh itu disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pihak terkait untuk menjaga dan menjamin tidak adanya pelanggaran yang terjadi didalam Gedung bioskop dan menjadikan bioskop di Aceh berbasis Syariat.

“Sebenarnya tempat hiburan terutama gedung bioskop di Kota Banda Aceh kurang dari pengawasan, sehingga tempat hiburan seharusnya menjadi tempat yang bermanfaat karena kurangnya pengawasan tersebut membuat setiap tempat hiburan memiliki freming yang kurang bagus yang diberikan oleh masyarakat tertentu, sehingga bioskop juga dikaitkan juga sebagai tempat yang gelap tanpa pengawasan yang jelas”⁷⁴

Dari Analisa diatas penulis menyimpulkan bahwa bioskop tidak akan terealisasikan di Kota Banda Aceh jika pengawasan dan kebijakan belum jelas dari pihak pemerintah terkait izin pembangunan dan kajian peraturan daerah Kota Banda Aceh belum jelas akan hal itu.

2. Komunikasi (DPM-PTSP Kota Banda Aceh) Terkait Syarat Perizinan Pembangunan Bioskop Di Kota Banda Aceh

Syarat-syarat terdapat dalam perizinan yaitu bersifat kondisional dan konstitutif. Bersifat kondisional yaitu penilaian dapat dilihat, dinilai apabila penilaian tersebut sudah ada dan sesudah perbuatan maupun tingkah laku di isyaratkan tersebut terjadi.

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Azwar, Bagian Komunikasi Pimpinan Humas Kota Banda Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022.

Bersifat konstitutif yaitu suatu perbuatan maupun tingkah laku yang ditentukan harus terpenuhi, yang artinya suatu pemberian izin harus dipenuhi apa bila tidak terpenuhi maka akan dikenakan sanksi.⁷⁵

a. Sistem izin terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1) Larangan

Larangan yang dimaksud adalah suatu izin yang diterapkan oleh pemerintah dijadikan instrumen yuridis yang mempunyai sifat sebagai pencegahan atau preverentif instrumental. Izin juga instrumental dan dapat dipake dalam bidang. Hukum administrasi, yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti prosedur yang dianjurkan untuk mencapai suatu tujuan. Setiap hal yang dilarang dalam penetapan perizinan harus diatur dalam peraturan perundangundangan yaitu berlandaskan pada asas negara hukum.

2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin)

Perizinan ialah persetujuan dari pemerintah pada norma larangan, karenanya izin harus berdasarkan pada ditetepkannya keputusan pemerintah, bukan isi dari izin yang dijadikan peraturan norma penetapan, oleh karena itu izin dalam bentuk tertulis, konkret dan individual harus memuat uraian dengan jelas mengenai isi perizin yang diberikan.

⁷⁵Soehino, Asas-asas Tata Pemerintah, Yogyakarta :Liberty,1984.hlm 97

3) Ketentuan yang berhubungan dengan izin

Ketentuan merupakan syarat yang mendasari pemberian suatu perizinan oleh pemerintah. Banyaknya perizinan yang dihubungkan dengan syarat yang berkaitan dengan instrumen pengendalian oleh pemerintah yang berfungsi sebagai sistem perizinan.⁷⁶

b. Fungsi dan Tujuan

Perizinan memiliki fungsi yaitu sebagai fungsi penertiban dan fungsi pengaturan. Fungsi penertiban yang dimaksud yaitu agar setiap izin atau kegiatan yang terjadi di masyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga dapat terwujudnya suatu ketertiban dalam setiap kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari fungsi pengaturan yang dimaksud yaitu supaya perizinan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya, supaya tidak disalah gunakanya izin yang diberikan, fungsi pengaturan dapat diartikan juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pihak yang berwenang atau pemerintah.⁷⁷

c. Persyaratan Perizinan

Persyaratan adalah segala sesuatu yang wajib dilaksanakan dan terpenuhinya oleh pemohon untuk mendapatkan izin yang di inginkan. Persyaratan merupakan proses yang menjadi syarat utama. oleh kreteria berikut:

⁷⁶ Ramlan Irwan, Perizinan Publik Dikutip Dari Detik.Com. Diakses Pada Tanggal 22 April 2022.

⁷⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), H.193.

- 1) Tertulis dengan jelas regulasi harus ditulis dengan jelas supaya segala perizinan terlaksana dengan baik.
- 2) Memungkinkan untuk dipenuhi perizinan harus mudah dilaksanakan oleh pengurus izin yaitu berasaskan pada asas kemudahan. Meskipun harus memperhatikan sasaran regulasi yang bersifat ideal.
- 3) Berlaku universal perizinan diharuskan bersifat universal dan inklusif supaya tidak menimbulkan sikap diskriminatif.
- 4) Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait (termasuk memenuhi ketentuan internasional).⁷⁸

d. Prosedur Perizinan Pembangunan Tempat Hiburan

Prosedur pembangunan tempat hiburan

- 1) Rumah Bilyard yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain bilyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- 2) Diskotik dan Bar yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas dalam ruang tertutup dan kedap suara untuk menyanyi, dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
- 3) Kafe, Karaoke dan Pub yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk hiburan diruang yang tidak tertutup dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- 4) Salon dan Rias Pengantin yaitu setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk

⁷⁸Adrian sutedi, *Hukum Perizinan...*, H.187.

memotong, menata rambut, merias muka, dekorasi serta menyediakan fasilitas untuk keperluan adat.

- 5) Balai Pertemuan Umum yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- 6) Gelanggang Permainan dan Ketangkasan yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- 7) Pemandian Alam yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan sumber air, air terjun atau air panas sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.⁷⁹

Terlepas dari itu Kepala Dinas Perizinan Kota Banda Aceh yang diwakili oleh Bapak T. M. Taufik Alam Syah juga mengatakan sampai saat ini belum ada pengusaha ataupun investor yang datang kemari untuk mengajukan pembangunan gedung bioskop di Kota Banda Aceh, hal ini juga disebabkan karena tidak adanya kepastian hukum terkait pembangunan gedung bioskop di Kota Banda Aceh.

⁷⁹ Rifia Erna Susianti, Prosedur Pendirian Perizinan Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum (Urhu) Oleh Kantor Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Boyolali, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009

*“Sampai saat ini tidak ada pengusaha atau investor yang datang untuk meminta izin pembangunan gedung bioskop, jika pun ada pasti nanti akan diadakan rapat antara pihak MPU dan pihak terkait akan memastikan bagaimana aspek dari pembanunan bioskop di Banda Aceh. Dari semenjak tahun 2004 terakhir adanya bioskop di Kota Banda Aceh dan sampai saat ini tidak ada lagi masuk untuk perzinan pembangunan bioskop di Kota Banda Aceh”.*⁸⁰

Bapak T.M Taufik Alam Syah juga menyatakan bahwa Dinas perizinan Kota Banda Aceh menjadi salah satu dinas yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan izin usaha maupun izin tempat untuk pembangunan gedung bioskop di Kota Banda. Dalam wawancara bersama dengan Bapak T.M Taufik Alam Syah, Kepala Bagian Perizinan dan Analisi Kebijakan. Beliau menjelaskan bahwasanya.

*”Untuk komunikasi perizinan terkait pembangunan gedung bioskop saat ini, masih menunggu kebijakan yang resmi dari pemerintah terkait atas dasar dan regulasi yang jelas tentang pembangunan gedung bioskop ini. Hal ini bisa saja melibatkan banyak orang terkait jika adanya pembanunan bioskop di Kota Banda Aceh, salah satunya melibatkan pihak MPU atau pihak Dinas Syariat Islam untuk melakukan survey terkait ini dan meminta kelengkapan data, tujuan dan fungsi bioskop di Kota Banda Aceh.”*⁸¹

Dari kutipan diatas penulis menyimpulkan bahwasanya komunikasi perizinan bioskop harus memiliki regulasi yang jelas terkait pembangunannya, agar investor atau pengusaha yang ingin membangun bioskop di Kota Banda Aceh tidak lagi termakan freming atau isu yang membuat pembangunan gedung bioskop di Kota Banda Aceh tidak terealisasikan.

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak T.M Taufik Alam Syah, Kepala Bagian Perzinan dan Analisi Kebijakan, Pada Hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022.

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak T.M Taufik Alam Syah, Kepala Bagian Perzinan dan Analisi Kebijakan, Pada Hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022

Tidak hanya itu, kebijakan dan sarana yang jelas juga menjadi tolak ukur akan adanya pembangunan bioskop di Kota Banda Aceh yang semestinya tidak terlalu diberatkan dan sama dimudahkan seperti izin pembangunan tempat hiburan lainnya di Kota Banda Aceh.

3. Komunikasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Terkait Regulasi Pembangunan Bioskop Banda Aceh.

Dalam sejarahnya, Aceh merupakan salah satu kesultanan Islam paling kuat di Asia Tenggara. Daerah ini telah lama menggunakan jenis hukum Islam informan yang di padukan dengan hukum setempat atau yang dikenal "hukum adat".

Undang-undang tersebut ditingkatkan ketika konflik separatis Aceh berakhir pada 2005. Secara bertahap, undang-undang tersebut diperluas ke lebih banyak pelanggaran dan terakhir dilakukan pada 2014. Namun faktanya, penerapan hukum syariah ini ditanggapi berbeda oleh berbagai pihak.

Pengaruh Syariat Islam juga berdampak terhadap perkembangan bioskop di kota Banda Aceh. Pada saat Qanun Syariat Islam diterapkan, pemutaran film di bioskop mulai dibatasi dan film yang diputar diseleksi terlebih dahulu. Walaupun penetapan Qanun Syariat Islam baru dilakukan pada tahun 2001, akan tetapi pemerintah tetap mengontrol bioskop bioskop agar film-film yang diputar sesuai dengan norma Agama. Bahkan pemerintah membentuk sebuah tim yang bertugas khusus untuk menyeleksi film-film di bioskop.⁸²

⁸²Rizal Saivana, Sejarah Perkembangan Bioskop..., H. 46-47.

Bapak Iswanda, S.Ag sebagai Kabid dakwah dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh juga menjelaskan terkait regulasi yang berkaitan dengan perizinan pembangunan bioskop di Kota Banda Aceh, menyatakan bahwa.

“Tidak ada ketakutan terkait Syariat yang diterapkan di Kota Banda Aceh, regulasi terkait izin hiburan itu kembali lagi bagaimana tempat hiburan ataupun bioskop semacamnya bisa menyesuaikan dengan Syariat yang sudah di terapkan di Kota Banda Aceh, hal ini sama dengan juga hukum mubah yang d iterapkan di dalam Islam, semua bisa menjadi haram jika kegunaanya tidak sesuai dengan Syariat dan ajaran Islam yang berlaku”⁸³

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa regulasi terkait pembangunan gedung bioskop di Kota Banda Aceh tidak ada larangan, namun semua kembali lagi bagaimana bioskop tersebut bisa disesuaikan dengan penerapan syariat Islam yang ada di Kota Banda Aceh.

4. Komunikasi BPNB Aceh Terkait Berdirinya Mini Bioskop Sebagai Wadah Pemutaran Film Alternatif

Kepala Badan Pelestarian Nilai Budaya Aceh (BPNB Aceh) Bapak Piet Rusdi juga menjelaskan bebsberapa poin tentang penting nya bioskop di Kota Banda Aceh terutama untuk pegiat film diranah Aceh, karena nilai positif adanya bioskop akan membuat banyak anak muda semakin kreatif dalam membuat satu karya film yang bisa ditonton oleh orang banyak dalam satu wadah gedung bioskop, BPNB sendiri memeiliki satu wadah ruang pemutaran yang dinamakan dengan Bioskop Mini dan Bisokop Keliling, kedua wadah tersebut menjadi satu tugas pokok dinas BPNB yang ditinjau langsung oleh pemerintah.

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Iswanda, S.Ag sebagai kabid dakwah dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Pada Hari Jumat Tanggal 04 Juli 2022.

“Mini Bioskop adalah satu wadah paling kecil di Aceh terutama Kota Banda Aceh yang menjadi sentral perfilman Aceh, dengan adanya ruangan mini bioskop saja banyak anak muda pegiat film tertarik untuk memutar film di ruang ini. Mini bioskop BPNB bisa saja menjadi acuan utama ataupun landasan utama bahwasanya pembangunan bioskop tidak dilarang didirikan di Kota Banda Aceh, karena sampai hari ini tidak ada penolakan dari pihak manapun terkait di banggunya mini bioskop di Kota Banda Aceh”⁸⁴

Banda Pelestarian Nilai Budaya Aceh (BPNB Aceh) menjadi salah satu dinas yang menyediakan gedung mini bioskop di daerah Kuta Alam Banda Aceh, dengan adanya sarana gedung mini bioskop tersebut menjadikan tempat berkumpulnya sineas muda Aceh untuk diskusi film dan menonton film hasil produksi komunitas-komunitas film yang ada di Kota Banda Aceh.

Dari hasil wawancara bersama Dinas BPNB yang diwakili oleh Bapak Piet Rusdi yang menjelaskan terkait komunikasi perizinan pembangunan bioskop di Kota Banda Aceh beliau menjelaskan.

“Komunikasi perizinan pembangunan bioskop juga masih kurang jelas antara iya dan tidak. Adanya mini bioskop di BPNB menjadi salah satu sarana yang diawasi langsung oleh kementrian RI, dan ini menjadi bukti bahwasanya bioskop juga bisa di bangun di Kota Banda Aceh, karena tidak menutup kemungkinan ketika adanya bioskop di Aceh akan membuat banyak anak muda terus berkarya dengan banyak film dan referensi film populer yang di tayangkan di bioskop. Dari komunikasi ini, semua kembali lagi bagaimana seharusnya bioskop yang diterapkan di Kota Banda Aceh sesuai dengan peraturan Syariat Islam yang berlaku di Aceh, jika semua sudah terpenuhi pasti pembangunan bioskop di Kota Banda Aceh akan segera terealisasikan.”⁸⁵

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Piet Rusdi BPNB Aceh, Pada Hari Sabtu Tanggal 3 Juni 2022

⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan Piet Rusdi BPNB Aceh, Pada Hari Sabtu Tanggal 3 Juni 2022

Dari hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa pembangunan bioskop akan berjalan dengan baik jika memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di Kota Banda Aceh. Sehingga nantinya tempat hiburan seperti bioskop dan media hiburan lain juga bisa ditemukan di Kota Banda Aceh dengan fasilitas yang disesuaikan dengan Syariat.

D. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Setelah dilaksanakan wawancara terakait perizinan pembangunan bioskop di Banda Aceh dengan informan penelitian baik dari tokoh pegiat film maupun tokoh sejarawan Aceh dan Dinas terkait seperti BPNB Aceh, PTSP Kota Banda Aceh, Humas Kota Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data. Data yang ditemukan langsung dari informan dengan hasil temuan yang kemudian dikonfirmasi dengan teori dari kajian pustaka. Perihal tersebut mengenai penelitian ini penulis menganalisa Komunikasi Pembangunan Gedung Bioskop di Kota Banda Aceh. Poin penting dari analisa ini adalah faktor penyebab bioskop di Aceh tidak terlealisasikan sampai saat ini dan bagaimana komunikasi pemerintah terkait perizinan pembangunan bioskop di Kota Banda Aceh.

Dalam penelitian ini seperti yang sudah dipaparkan pada bab dua, penulis mengkaji kajian ini dengan menggunakan teori komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi menjadi tolak ukur suksesnya satu permasalahan dari problem yang ada didalam satu dinas ataupun satu instansi perusahaan swasta seperti halnya izin pembangunan bioskop di Kota Banda Aceh.

Dalam perizinan pembangunan dinas-dinas tersebut membangun model komunikasi organisasi untuk mengoptimalkan kinerja dan membuat lingkungan kerja menjadi kondusif. Dengan menjalankan sebuah hubungan yang harmonis sangat dibutuhkan komunikasi yang efektif antara pimpinan dan karyawan.

Dalam Dinas tersebut pimpinan menjadi penentu suatu kegiatan yang direncanakan berlangsung dengan memberikan arahan dan perintah. Pimpinan ini adalah satu-satunya yang dapat menerima dan mengirim informasi dari semua karyawan. Sehingga jika ada karyawan berkomunikasi ke karyawan-karyawan lain maka informasinya disampaikan ke pimpinan.

Selain menggunakan teori komunikasi organisasi, penelitian ini juga menggunakan teori komunikasi massa karena berkaitan dengan sarana hiburan untuk Masyarakat Kota Banda Aceh. Hiburan yang dimaksud adalah gedung bioskop yang sampai hari ini tidak terealisasikan di Kota Banda Aceh, dengan menggunakan teori komunikasi massa ini membuat peneliti leluasa untuk mengkaji bagaimana sebaiknya penyebaran informasi untuk khalayak ramai terutama penggiat film dan komunitas film yang ada di Kota Banda Aceh mendapatkan fasilitas gedung bioskop yang bisa menyebarkan informasi yang baik terkait film dakwah yang ditayangkan di bioskop. Komunikasi massa juga berkaitan dengan penyebarluasan informasi selain media massa seperti televisi, koran, majalah, media online, dan termasuk bioskop didalamnya, dengan hal ini menguatkan penulis untuk meneliti dan mengkaji hasil wawancara dari informan terkait komunikasi pembangunan bioskop di Kota Banda Aceh sehingga bisa menjadi referensi ketika nanti ada pembangunan gedung bioskop di Kota Banda Aceh.

Dari hasil kajian yang ditemukan dilapangan dengan menggunakan teori komunikasi organisasi dan teori komunikasi massa mendapatkan hasil bahwa bioskop tidak terealisasikan di Kota Banda Aceh disebabkan oleh tidak jelasnya regulasi yang diberikan oleh pemerintah terkait atas dasar dan hukum yang berlaku di Kota Banda Aceh sehingga membuat masyarakat dan pengusaha bioskop enggan mengambil resiko yang lebih besar jika nantinya dibangun gedung bioskop di Kota Banda Aceh. Selain itu, penyebab tidak terealisasinya bioskop juga berpengaruh terhadap monopoli dalam perfilman yang membuat perkiraan untung rugi pemilik bioskop tidak jelas karena benturan dengan masyarakat tertentu yang tidak menginginkan kehadiran bioskop tersebut.

Kemudian juga disebabkan oleh pembobolan link illegal oleh masyarakat tertentu untuk memudahkan menonton film yang masih tayang di bioskop sehingga menonton film yang seharusnya berbayar didapatkan secara gratis oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan kejahatan *cyber crime* di media akan mudah dilakukan ketika mereka tidak mendapatkan fasilitas seperti gedung bioskop di Kota-Nya.

Temuan selanjutnya mengenai komunikasi pemerintah terkait perizinan pembangunan bioskop di Kota Banda Aceh bahwa Freming masyarakat luar terhadap pemberlakuan Syariat Islam di Kota Banda Aceh yang beredar pada masyarakat hari ini, baik itu masyarakat luar maupun dari masyarakat Kota Banda Aceh itu sendiri, yang membuat beberapa pihak terutama investor atau pengusaha film enggan membangun gedung bioskop di Kota Banda Aceh karena masih tidak jelasnya regulasi dan jaminan untuk pembangunan gedung bioskop tersebut.

Temuan selanjutnya, tidak adanya peraturan yang jelas terhadap pembangunan gedung bioskop di Kota Banda Aceh. Bahwasanya komunikasi perizinan bioskop harus memiliki regulasi yang jelas terkait pembangunannya, agar investor atau pengusaha yang ingin membangun bioskop di Kota Banda Aceh tidak lagi termakan freming atau isu yang membuat pembangunan gedung bioskop di Kota Banda Aceh tidak terealisasikan. Tidak hanya itu, kebijakan dan sarana yang jelas juga menjadi tolak ukur akan adanya pembangunan bioskop di Kota Banda Aceh yang semestinya tidak terlalu diberatkan dan sama dimudahkan seperti izin pembangunan tempat hiburan lainnya di Kota Banda Aceh. Bahwa regulasi terkait pembangunan gedung bioskop di Kota Banda Aceh tidak ada larangan, namun semua kembali lagi bagaimana bioskop tersebut bisa disesuaikan dengan penerapan Syariat Islam yang ada di Kota Banda Aceh.

Kurangnya media hiburan visual di Kota Banda Aceh menjadi salah satu temuan yang membuat bayak anak muda dan komunitas film mengiginkan pembangunan bioskop di Kota Banda Aceh. Sehingga nantinya tempat hiburan seperti bioskop dan media hiburan lain juga bisa di temukan di Kota Banda Aceh dengan fasilitas yang disesuaikan dengan Syariat. Hal ini juga membuat kerinduan para masyarakat Kota Banda Aceh hari ini terhadap bioskop di Kota Banda Aceh masih banyak, walaupun sekarang sudah banyak media alternatif untuk menonton suatu film yang ingin ditonton. Bioskop bukan lagi sebagai media hiburan tetapi untuk saat ini bioskop menjadi media terbaik bagi pemuda atau komunitas film untuk terus bekarya.

Seperti halnya yang ditulis oleh Rizal Saivana. Animo Masyarakat yang mengharapkan kehadiran bioskop cukup mendapat perhatian masyarakat di Banda Aceh. Kehadiran bioskop menjadi sesuatu hiburan yang sangat penting di tengah-tengah gaya hidup masyarakat kota. Hiburan menjadi perilaku orang Banda Aceh yang menyukai kehidupan di malam hari. Bioskop merupakan hiburan masyarakat di Banda Aceh yang kemudian menjadi bagian dari budaya urban, hanya dalam kurun beberapa tahun bioskop telah menjadi komoditi perdagangan yang menjanjikan.

Penduduk Kota lebih menggemari dan menerima kebudayaan yang bersifat populer, sehingga pemerintah kota memandang perlu untuk memenuhi animo masyarakat yang haus hiburan. Akhirnya bermunculan bioskop di Kota Banda Aceh. Hiburan dapat membangkitkan dan menghidupkan perekonomian masyarakat mulai dari pedagang kaki lima, penjual kaset, penjual koran, takang becak serta warung makan.

Kegemaran masyarakat berkaitan dengan ritme kehidupan kota yang serba cepat membuat masyarakat di kota Banda Aceh lebih menerima hiburan yang mudah dicerna dan dinikmati. Mulai dari tahun 1930-an banyak bioskop berdiri di kota Banda Aceh, mulai dari Rex bioskop, Deli bioskop, Garuda Theater, bioskop Merpati dan lain-lain.⁸⁶

⁸⁶ Rizal Saivana, Sejarah Perkembangan Bioskop Di Kota Banda Aceh Tahun 1930-2004. Banda Aceh Universitas Syiah Kuala, 2016

Pada tahun 1970 hingga tahun 1980-an banyak warga yang berbondong-bondong datang untuk menyaksikan pemutaran film di bioskop karena pemutaran film yang dilakukan oleh pengusaha bioskop semakin banyak dan bervariasi. Tidak hanya warga Kota Banda Aceh saja yang datang untuk menyaksikan pemutaran film di bioskop, tetapi banyak juga warga dari pinggiran kota seperti daerah Sibreh, Indrapuri, Montasik dan lain-lain yang berjalan kaki atau bersepeda datang ke Banda Aceh untuk menonton film di bioskop.

Bahkan ada beberapa nelayan yang baru pulang mencari ikan dilaut tidak langsung kembali kerumahnya tetapi mereka terlebih dahulu datang ke bioskop untuk menonton film setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan ikan. Dari hal tersebut kita bisa melihat bagaimana antusiasme masyarakat dengan hadirnya bioskop karena masyarakat menganggap bahwa hadirnya bioskop di Kota Banda Aceh bisa menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat di tengah sibuknya aktifitas sehari-hari.

Kehadiran bioskop sendiri merupakan hiburan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat di tengah kurangnya hiburan yang tersedia. Dukungan dari masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan bioskop di kota Banda Aceh karena antusiasme masyarakat menjadikan bioskop semakin maju dan terus berkembang di Kota Banda Aceh.⁸⁷

⁸⁷Rizal Saivana, Sejarah Perkembangan Bioskop Di Kota Banda Aceh Tahun 1930-2004. Banda Aceh Universitas Syiah Kuala, 2016

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait Komunikasi perzinan pembangunan bioskop di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Bioskop tidak terealisasikan di Kota Banda Aceh di sebabkan oleh tidak jelasnya regulasi yang di berikan oleh pemerintah terkait atas dasar dan hukum yang berlaku di Kota Banda Aceh sehingga membuat masyarakat dan pengusaha bioskop engan megambil resiko yang lebih besar jika nantinya dibangun gedung bioskop di Kota Banda Aceh, selain itu, penyebab tidak terealisasikan nya bioksop juga berpengaruh terhadap monopoli dalam perfilman yang membuat perkiraan untung rugi pemilik bioskop tidak jelas karena benturan dengan masyarakat tertentu yang tidak menginginkan kehadiran bioskop tersebut.
2. Komunkasi perizinan bioskop harus memiliki regulasi yang jelas terkait pembangunannya, agar investor atau pengusaha yang ingin membangun bioskop di Kota Banda Aceh tidak lagi termakan freming atau isu yang membuat pembangunan gedung bioskop di Kota Banda Aceh tidak terealisasikan. Tidak hanya itu, kebijakan dan sarana yang jelas juga menjadi tolak ukur akan adanya pembangunan bioskop di Kota Banda Aceh yang semestinya tidak terlalu diberatkan dan sama dimudahkan seperti izin pembangunan tempat hiburan lainnya di Kota Banda Aceh

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari penelitian ini, maka peneliti ingin menyampaikan sara-saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh pegiat film baik itu disatukan dalam satu komunitas-komunitas film yang ada di Kota Banda Aceh, maupun individual yang menginginkan pembangunan bioskop di Kota Banda Aceh, agar sama-sama dapat membuat satu gerakan yang bisa membuat pembangun bioskop di Kota Banda Aceh ini segera terealisasikan. Baik itu aksi sosial ataupun aksi membahas tentang bagaimana Aceh tanpa bioskop saat ini. Hal ini bisa mendorong investor atau pengusaha agar mendirikan bioskop di Kota Banda Aceh dan menepis fremiting negatif dari masyarakat terkait gedung bioskop.
2. Untuk Pemerintah yang bersangkutan baik itu dalam ranah perizinan maupun pemerintah yang menjalankan tugas yang berkaitan dengan Syariat Islam yang ditetapkan di Aceh saat ini. Dalam hal ini pemerintah harus mengeluarkan peraturan resmi terkait satu regulasi yang mengatur bagaimana seharusnya dan selayaknya pembangunan tempat hiburan baik itu tempat terbuka maupun tertutup seperti bioskop, agar nantinya pengusaha dan investor tidak lagi meraba-raba akan kejelasan peraturan yang diterapkan di Aceh. Karena untuk saat ini penghambat terbangun nya bioskop itu di sebabkan oleh penolakan dan tidak adanya jaminan yang diberikan oleh masyarakat Aceh sendiri jika nantinya bioskop di bangun di Kota Banda Aceh.

3. Saran yang ditawarkan oleh penulis agar nantinya menjadi referensi atau rujukan bagaimana dasar yang baik dalam membangun gedung bioskop di Kota Banda Aceh.
- a. Gedung bioskop bisa diberikan pemisah antara penonton laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, agar terhindar dari khalwat dan hal yang tidak diinginkan, walaupun bioskop saat ini sudah dilengkapi dengan camera imflamerah yang menangkap semua gerak gerik penonton didalam gedung bioskop.
 - b. Gedung bioskop bisa langsung diawasi oleh pihak berwenang seperti Wilayatul Hisbah (WH) yang bisa menjaga semua penonton yang ingin memasuki gedung bioskop.
 - c. Memutar film yang bernuansa Islami dan film yang berwawasan pengetahuan dan dakwah didalam nya.
 - d. Membuat peraturan yang resmi terkait pemutaran dan film yang ingin diputar, dan harus adanya rate untuk setiap film yang di putarkan didalam bioskop.
 - e. Gedung bioskop yang bernuansa Islami didalamnya bisa disesuaikan dengan desain Arsitekstur Islami nya.
 - f. Tidak membuka jadwal menonton diwaktu tertentu seperti waktu masuknya jam sholat dan diberlakukan nya jam malam saat pemutaran dimalam hari.

DAFTAR PUSAKA

A. Daftar Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (yogyakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi suatu pengantar*, (Bandung: Rosda,2000)
- Dewi Iriani, *Sejarah Industri Perfilman Indonesia*, (Banda Aceh: Badan Pelestarian Nilai Budaya, 2011)
- Denis McQuail. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 1987),
- Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),
- Dani Vardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Cet. II (Jakarta: PT Indeks, 2008)
- Eko Harry Susanto, *Komunikasi Manusia Esensi dan Aplikasi dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik*, Edisi. I, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010)
- Elvinaro Ardianto, Dkk. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2007),
- John M.Echol dan Hassan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1985)
- Kumba Digdowiseiso, *Teori Pembangunan*, (Jakarta : Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2019)
- Khomsahrial Romli, *Komunikasi Organisasi Lengkap*, Cet. I, Edisi. I (Jakarta:Grasindo, 2011)
- Kurnia Novi, *Menguak Peta Perfilman Indonesia*, (Jakarta: Langit Aksara Yogyakarta, 2004),
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramdia, 1985)
- Nuruddin. *Pengantar Komunikasi Massa*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Philipus hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Surabaya: Yuridika,2002)

- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2003)
- Rohim, Syaiful. *Teori Komunikasi Perspektif, Ragam, dan Aplikasi*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2005)
- Saivana, Rizal. *Sejarah Perkembangan Bioskop di Kota Banda Aceh Tahun 1930-2004. Banda Aceh FKIP Universitas Syiah Kuala*, (Banda Aceh:Universitas Syiah Kuala, 2016)
- Stanley J. Baran, *Introduction to Mass Communication Media Literacy and Culture*, Edition. 5, (New York: McGraw-Hill, 2009)
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhaw, *Syekh Muhammad Yusuf Qardhaw, Alih Bahasa: H. Mu'ammal Hamidy* (Jakarta: Bina Ilmu, 1993)
- Sudarwan Darnim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2022)
- Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017)
- Takashi dan Shiraishi. *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat Di Jawa*, (Jakarta: Midas Surya. 1997)
- Tjasmadi, HM Johan, dan SM Ardan. *Sejarah Bioskop*. (Jakarta: Sinematek Indonesia, 1992)
- Werner J. Severin dan James W. Tankard, *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*, Cet. V, Edisi. V, (Jakarta: Kencana, 2011),
- Zaenal Mukarom, *Teori-Teori Komunikasi*, (Bandung: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati, 2020)

B. Daftar Skripsi

- Cut Khairina Rizky, *Bioskop dan Anak Muda Aceh: Studi tentang Gerakan Anak Muda Banda Aceh terhadap Ketiadaan Bioskop di Provinsi Aceh*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Rifai Manani, *Perancangan Bioskop Menggunakan Pendekatan Arsitektur Islam Di Banda Aceh*, Fakultas Sains Dan Teknologi, UIN Ar-Raniry, 2022

C. Daftar Jurnal

- Andri Yuna Ginting, "Prosedur Perolehan Izin Tempat Hiburan Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara". Jurnal usu.ac.id

- Denny Agung Prasetyo, J.D, S.M, *Perancangan Gedung Bioskop Di Kota Sintang*, Jurnal Mosaik Arsitektur, 2021, Vol. 9, No. 1
- Evy Urmilasari, Andi M. Rusli, A. Lukman Irwan, “*Analisis Pelayanan Perizinan Di Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Makassar*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 1
- Helmi, “*Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia*”, Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.1
- Helmi, *Sistem Pelaksanaan Perizinan di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 9 No.1
- M. Budi Mulyadi, “*Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan UMKM*”, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.4 No.1
- Nurwigati, “*Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Mewujudkan Fungsi Izin sebagai Alat Pengendali Bagi Kegiatan Masyarakat yang Membahayakan Lingkungan*”, Jurnal Media Hukum Vol 17 No 1
- Rizal Saivana, Mawardi, dan Zainal, “*Perkembangan Bioskop Di Kota Banda Aceh (1930-2004)*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 2016, Vol. 1, No. 1,
- Suryo Pratolo, “*Peran Otonomi Daerah Untuk Meningkatkan Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Instrumen Manajemen Dalam Kebijakan Alokasi Belanja Pelayanan Publik*”, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 12 No. 1
- Salman Yoga S, “*Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi*”, Jurnal Al-Bayan Vol. 24 No. 1
- Zikri Fachrul Nurhadi1, Achmad Wildan, *Kajian Tentang Efektivitas Pesan Dalam Komunikasi*, Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran Dan Penelitian, 2017, Volume. 3 No. 1

D. Daftar Website

Rusdiman, “*Bioskop untuk Banda Aceh*”. Dikutip dari tumblr.com_diakses pada tanggal 28 Januari 2022.

Kegiatan tersebut dilakukan oleh M. Fauzan Febriansyah pada tahun 2013. Dilansir melalui laman <https://bioskopuntukbandaaceh-blog.tumblr.com/> diakses pada tanggal 21/12/2018.

Angen, Loh Thayeb. 2016. Illiza Main Film, *Akankah Bioskop Dibangun di Banda Aceh?* Dilansir melalui laman <http://portalsatu.com/read/opini/-12415> diakses pada 04/05/2022

Sulistiyono, Seno Tri. 2018. *Saat Jokowi Limpahkan Pertanyaan Soal Bioskop ke Plt Gubernur Aceh.* Dilansir melalui laman <https://www.msn.com/i> pada 04/05/2022

Wijaya, Herman. *Bioskop di Aceh, Perlukah?.* 2017. Dilansir melalui laman <http://balaikita.com> pada tanggal 04/05/2022

fif. *Sudah Saatnya Ada Bioskop di Aceh.* 2018. Dilansir melalui laman. <https://www.merdeka.com>

Ali Yusuf/ Nashin Nashrullah “*Apa Maksud Allah dan Rasul-Nya Melihat Amalan Kita Kelak?*” Apa Maksud Allah dan Rasul-Nya Melihat Amalan Kita Kelak? | <https://.RepublikaOnline.com>.

Ramlan Irwan, *Perizinan Publik* Dikutip Dari Detik.com Diakses Pada Tanggal 22 April 2022.

Sekilas Sejarah Bandar Aceh Darussalam, <https://bandaacehkota.go.id/> diakses 15 Juni 2022

Profil Kota Banda Aceh, <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/58>, diakses 15 Juni 2022

Profil DPM-PTSP Kota Banda Aceh, <https://dpmptsp.bandaacehkota.go.id>, diakses 26 Juni 2022

Profil dan *Tupoksi Dinas BPNB Aceh-Sumut*, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id> diakses 26 Juni 2022

Tugas Humas dan Peranannya dalam Sebuah Organisasi, <https://kumparan.com>, diakses 05 Juli 2022

Profil dan Tugas Dinas Syariat Kota Banda Aceh, <https://Dinassyariatislam.com>, diakses 05 Juli 2022

Dikutip dari Kapitalisme Global dan Upaya Reborn Bioskop Aceh - Pojok Opini diakses pada 23 Juli 2022

E. Daftar Referensi Lainnya

BBC. 2018. Bioskop Pertama Arab Saudi Akan Dibuka Dengan Black Panther, Penonton Lelaki dan Perempuan.

Disampaikan dalam Program Wali Kota Menjawab yang disiarkan langsung oleh 10 radio swasta di Banda Aceh, Jumat, 16 Maret 2018

Pernyataan tersebut berasal dari Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas dalam acara Sosialisasi Sensor Mandiri oleh LSF (Lembaga Sensor Film) di Hotel Hermes Palace, pada tanggal 21 Februari 2017.

Rifia Erna Susianti, Prosedur Pendirian Perizinan Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum (Urhu) Oleh Kantor Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Boyolali, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009



LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI



Gambar 1 : Bersama Bapak Nab Bhany As, sebagai penulis dan sastrawan Aceh



Gambar 2 : Bersama Bapak Fauzan Santa, praktisi senior film aceh



Gambar 3 : Bersama Bapak Piet Rusdi dari Dinas Badan Pelestarian Nilai Budaya Aceh



Gambar 4 : Bersama Bapak Azhari Aiyub, sebagai penulis kura-kura berjenggot dan penggerak Yayasan tingkar pandan



Gambar 5 : Bersama Bapak Davi Mansuri Alias Davi Abdullah, sebagai praktisi film Aceh



Gambar 6 : Bersama Bapak T.M Taufik dari Dinas PTSP Kota Banda Aceh



Gambar 7 : Bersama Bapak Iswanda M. Ag dari DSI Kota Banda Aceh



Gambar 8 : Bersama Bapak Azwar dari Humas Kota Banda

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.778/Un.08/FDK/KP.00.4/02/2022**

**Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Dr. Salman Yoga, MA..... PEMBIMBING UTAMA (Subtansi Penelitian)
2) Asmaunizar, S.Ag.,M.Ag..... PEMBIMBING KEDUA (Teknik Penulisan)

Untuk membimbing KRU Skripsi:

Nama : Belli Bel Fatjeri
NIM/Jurusan : 180401081/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Judul : *Komunikasi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Perizinan Pembangunan Bioskop*

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 17 Februari 2022 M
15 Rajab 1443 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,


Fakhri

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabog. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 17 Februari 2023



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH

Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888. Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id), Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 342

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Membaca : Surat dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B.1909/Un.08/FDK-1/PP.00.9/05/2022 Tanggal 17 Mei 2022 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Belli Bel Fatjeri
- Alamat : Jl. Gampong Tanjung Selamat Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Komunikasi Perizinan Pembangunan Bioskop di Kota Banda Aceh
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Komunikasi Perizinan Pembangunan Bioskop di Kota Banda Aceh (Penggumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : - Walikota Banda Aceh
- Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
- DPM-PTSP Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Drs. Yusri, M.L.I.S (Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kelembagaan)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 31 Mei 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,**

Bachtiar, S.Sos

Pembina Utama Muda/ NIP. 19690913 199011 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI ACEH

Jln. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh, 23123
Telp. (0651) 23226 Fax. (0651) 23226
Email: bpnbaceh@kemdikbud.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0372 /F7.25/TU.00.01/2022

Kasubbag Tata Usaha Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Belli Bel Fatjeri
NPM : 180401081
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Benar yang namanya tersebut di atas melakukan penelitian pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh dari tanggal 16 s.d 22 Juni 2022. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan judul " Komunikasi Perizinan Pembangunan Bioskop di Kota Banda Aceh ".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

Banda Aceh, 23 Juni 2022

An. Kepala,
Kasubbag Tata Usaha

Piet Rusdi, S. Sos

NIP. 198003042006051003



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Jalan Tgk. Abu Lam U No. 7 Telp. (0651) 22744 Banda Aceh, 23242

SURAT KETERANGAN

Nomor : 262 / HMS / 2022

Dengan ini kami menerangkan bahwa yang bernama dibawah ini :

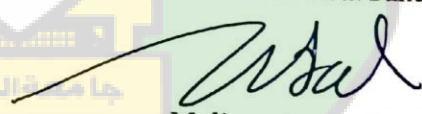
Nama : Belli Bel Fatjery
NIM : 18401081
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Program Study : Komunikasi Penyiar Islam

Telah melakukan penelitian dan wawancara di Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan Banda Aceh untuk keperluan Penulisan Tugas Akhir.

Demikian Surat Keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 14 Juli 2022

KEPALA BAGIAN PROKOPIM
Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh


Mulizar, S. Pd, M. Pd

NIP. 19790403 200501 1 005



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM - PTSP)

MAL PELAYANAN PUBLIK - GEDUNG PASAR ATJEH BARU LT. 3
JL. DIPONEGORO - BANDA ACEH - 23242 - TELP./FAX (0651) 32874

Banda Aceh, 19 Juli 2022

Nomor : 070/495/2022
Lampiran : -
Hal : Telah Melakukan penelitian

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Dakwah
dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh
di -
BANDA ACEH

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B.1909/Un.08/FDK-1/PP.00.9/05/2022 Tanggal 17 Mei 2022 tentang Izin penelitian atas nama Saudara/i:

Nama : Belli Bel Fatjery
Nim : 180401081
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul : Komunikasi Perizinan Pembangunan Bioskop Di Kota Banda Aceh.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDA ACEH

AR-RANIRY

MICHELISIL, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19630109 199310 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS SYARIAT ISLAM
Jln. Soekarno-Hatta Km 2 Mibo Banda Aceh
Telp. (0651) 44387 Fax. (0651) 44387
KOTA BANDA ACEH

Banda Aceh, 18 Juli 2022 M
18 Dzulhijjah 1443 H

Nomor : 070/188/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-
Banda Aceh

Assamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat.

Sehubungan dengan surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Nomor : 070/342/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang diterbitkan berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : B.1909/Un.08/FDK-1/PP.00.9/05/2022 tanggal 17 Mei 2022, tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian/Mencari Data yang dikeluarkan atas nama :

Nama : Belli Bel Fatjeri
Alamat : Jl. Gampong Tanjung Selamat kec. Darussalam Kab. Aceh Besar
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : WNI

Telah selesai melakukan Penelitian Ilmiah untuk Penulisan Skripsi pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, dengan judul : "Komunikasi Perizinan Pembangunan Boiskop di Kota Banda Aceh"

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya Dan terimakasih.

Kepala Dinas Syariat Islam
Kota Banda Aceh

Ridwan, S.Ag, M.Pd
Pembina TK. I

Nip 19680607 199903 1 003